

**ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP
PEREKONOMIAN DI SULAWESI SELATAN**

*ROLE OF AGRICULTURAL SECTOR TO
THE ECONOMY IN SOUTH SULAWESI*

**ANDI SAMSIR
P0700211002**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP
PEREKONOMIAN DI SULAWESI SELATAN**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan**

Disusun dan Diajukan Oleh

**ANDI SAMSIR
P0700211002**

Kepada

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

TESIS

**ANALISIS PERANAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP
PEREKONOMIAN DI SULAWESI SELATAN**

*ANALYSIS OF THE ROLES OF AGRICULTURAL SECTOR
ON SOUTH SULAWESI ECONOMY*

Disusun dan diajukan oleh

ANDI SAMSIR
Nomor Pokok P0700211002

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 10 Juli 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA
Ketua

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,

Dr. Agussalim, SE., M.Si

Dr. Paulus Uppun, SE., MA
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Ir. Mursalim

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah serta Nur-Nya pada kita sekalian, sehingga penulis mampu mempersepsikan alam semesta, sebagai sumber referensi dalam penulisan tesis yang ada dihadapan kita saat ini. Salam dan selawat kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sang pencerah dan suri tauladan bagi sekalian alam. Amin

Dalam penyusunan hingga selesainya tesis ini tidak terlepas sumbangsi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Rahmatia, SE.,MA. dan bapak Dr. Paulus Uppun, SE.,MA. selaku pembimbing yang selalu sabar dan setia dalam membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis dalam menyusun hingga terselesainya tesis ini.
2. Bapak Dr. Madris, DPS.,SE.,M.Si., Dr. Rahman Razak, SE.,M.Si., dan Dr. Sanusi Fattah, SE.,M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

3. Bapak Dr. Agussalim, SE.,M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
4. Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan selaku pihak otoritas di Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di berbagai instansi di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.
5. Kedua orang tua dan saudara-saudara kami yang selalu tulus memberikan dukungan material dan moril serta doa selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, dan Program Studi Ekonomi Sumber Daya angkatan 2011 yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya serta memberikan kontribusi berupa pemikiran hingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Akhirnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga pengorbanan dan bantuannya dirahmati oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kirtik dan saran yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berdoa semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis dirahmati Allah SWT.

Makassar 10 Juli 2013

Penulis

ABSTRAK

Andi Samsir, Analisis Peranan Sektor Pertanian terhadap Perekonomian di Sulawesi Selatan (dibimbing oleh **Rahmatia** dan **Paulus Uppun**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya keterkaitan ke depan dan ke belakang dan efek pengganda sektor pertanian terhadap perekonomian di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui survei literatur yaitu berupa data sekunder (*cross section*) input output Provinsi Sulawesi Selatan dengan alat analisis berupa metode Chenery-Watanabe dan Rasmussen dan pengganda output.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan langsung ke depan dan ke belakang masing-masing sebesar 0,33588 dan 0,22012 dan keterkaitan tidak langsung ke depan dan ke belakang masing-masing sebesar 1,90980 dan 1,32123. Pengganda output sektor pertanian sebesar 1,32123, dan pengganda pendapatan tipe I dan II masing-masing sebesar 1,25408 dan 1,49807, serta pengganda kesempatan kerja sebesar 1,15916.

Kata kunci: Keterkaitan ke depan, keterkaitan ke belakang, efek pengganda

ABSTRACT

Andi Samsir, Role of Agricultural Sector to The Economy in South Sulawesi, guided by **Rahmatia** and **Paulus Uppun**.

This study aims to quantify the magnitude of linkage to forward and backward and the multiplier effect on the economy of the agricultural sector in South Sulawesi.

This research was a descriptive study using a quantitative approach. The data was obtained through a survey of the literature in the form of secondary data (cross section) of South Sulawesi input output with analytical tools such as methods Chenery-Watanabe and Rasmussen and multiplier effects.

The results showed that the agricultural sector had a direct linkage to the front and rear respectively 0.33588 and 0.22012 and indirect linkages to the front and rear respectively 1.90980 and 1.32123. Agricultural sector output multiplier was equal to 1.32123, and the income multiplier of type I and II respectively 1.25408 and 1.49807, and 1.15916 for employment multiplier.

Keywords: forward linkages, backward linkages, the multiplier effect

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	15
B. Tinjauan Empiris	47
C. Kerangka Konsep	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Teknik Pengumpulan Data	56
B. Jenis dan Sumber Data	56
C. Metode Analisis Data	57
D. Definisi Operasional	70
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	100
B. Pembahasan	134

BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	143
	B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA		146
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
Tabel 1.1	: Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama, tahun 2010-2012	4
Tabel 1.2	: PDB atas harga berlaku dan konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2008-semester 1-2012	5
Tabel 1.3	: Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja, tahun 2008-2009	8
Tabel 4.1	: Kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011	81
Tabel 4.2	: Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011	83
Tabel 4.3	: Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan kerja utama di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2012	84
Tabel 4.4	: Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2011	86
Tabel 4.5	: Persentase pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2011	88
Tabel 4.6	: Ringkasan penjabaran APBD/RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013	90
Tabel 4.7	: Produk domestik bruto menurut penggunaan atas dasar harga konstan tahun 2000 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2011	

Tabel 5.1	: Jumlah permintaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	101
Tabel 5.2	: Jumlah penawaran barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	102
Tabel 5.3	: Persentase permintaan dan penawaran barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	103
Tabel 5.4	: Persentase biaya antara dan biaya primer Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	106
Tabel 5.5	: Nilai tambah output bruto Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	109
Tabel 5.6	: Nilai tambah bruto menurut sektor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	110
Tabel 5.7	: Komposisi nilai tambah bruto menurut komponennya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	112
Tabel 5.8	: Komposisi permintaan akhir menurut komponennya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	113
Tabel 5.9	: Persentase nilai perdagangan bersih menurut sektor provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	115
Tabel 5.10	: Keterkaitan langsung dan tidak langsung masing-masing sektor menurut sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	117
Tabel 5.11	: Keterkaitan langsung dan tidak langsung sektor pertanian terhadap sektor ekonomi lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	119
Tabel 5.12	: Daya penyebaran dan indeks kepekaan menurut sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009	121
Tabel 5.13	: Pengganda output, pengganda pendapatan, dan pengganda kesempatan kerja menurut sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009	126

Tabel 5.14 : Derajat ketergantungan ekspor, indeks
pengganda ekspor terhadap pendapatan, dan
indeks pengganda ekspor terhadap
kesempatan kerja menurut sektor ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
Gambar 1.1 : Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2006-2010	7
Gambar 1.2 : Perkembangan nilai tukar (year to year) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-20011	11
Gambar 2.1 : Kerangka Konsep	54
Gambar 5.1 : Indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan Sembilan sektor ekonomi tahun 2009	124
Gambar 5.2 : Kurva perbandingan nilai efek pengganda nominal dan nilai pengganda rill	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan, kemajuan ekonomi merupakan komponen utama pembangunan, tetapi itu bukan satu-satunya komponen. Tujuan dari suatu proses pembangunan yaitu bagaimana proses tersebut mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek aspek keuangan dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multidimensional, yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2006).

Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksud untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang sistematis. Tujuan pembangunan pada hakekatnya diarahkan pada proses perubahan dari status atau keadaan kesejahteraan rakyat yang kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan tersebut berupa kemampuan untuk meningkatkan kemampuan materi dan nonmateri. seperti peningkatan pendapatan dan output. Selain itu, proses pembangunan juga berkenan dengan proses perubahan yang radikal atas struktur

kelembagaan, sosial, dan administrasi serta sikap-sikap masyarakat dan nilai-nilai dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada akhir perang dunia kedua, konsep pembangunan sebagaimana digambarkan dalam model pembangunan tahap pertumbuhan (*stage-of-growth model of development*) oleh Walt W. Rostow, dimana dalam teori ini menggambarkan bahwa negara maju seluruhnya telah berada melampaui tahap tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Negara-negara berkembang atau terbelakang, pada umumnya masih berada dalam tahap masyarakat tradisional yaitu tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal landas. Secara tradisional, peran pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Berdasarkan pengalaman historis negara barat, apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian, yakni perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern dan pelayan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran utama sektor pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor industri yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan sebagaimana yang digambarkan dalam model pembangunan “dua sektor” Lewis (Jhingan, 2010).

Jika diperhatikan lebih jauh kondisi pertanian yang ada sekarang ini pada sebagian besar negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia akan disadari betapa banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Perbandingan sekilas antara produktivitas pertanian di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang akan memperjelas gambaran suram tersebut. Pola atau system-sistem pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda: *Pertama*, pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi, sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk. *Kedua*, pola pertanian yang kurang efisien yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya yang rendah sehingga hasil yang diperoleh acapkali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan penduduk daerah perkotaan, untuk keperluan sehari-hari para petani saja hasil-hasil pertanian yang ada tidak memadai.

Sebagian besar penduduk negara-negara dunia ketiga hidup dan bekerja di daerah pedesaan termasuk Indonesia. Lebih dari 65 persen penduduk negara-negara berkembang tinggal secara permanen, bahkan turun-temurun, sedangkan penduduk negara maju yang tinggal di desa-desa kurang dari 27 persen, demikian pula sekitar 58 persen angkatan kerja di negara dunia ketiga mencari nafkah di sektor pertanian sedangkan negara

maju hanya 5 persen. Sumbangan sektor pertumbuhan terhadap GNI di negara-negara berkembang secara keseluruhan masih berkisar pada angka 14 persen. Jika dibandingkan dengan sumbangan di negara-negara maju yang hanya mencapai 3 persen (Todaro & Smith, 2006).

Tabel 1.1. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama, tahun 2010-2012

Lapangan pekerjaan utama	2010		2011		2012
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	42,83	41,49	42,48	39,33	41,20
Industry	13,05	13,82	13,70	14,54	14,21
Konstruksi	4,84	5,59	5,59	6,34	6,10
Perdagangan	22,21	22,49	23,24	23,40	24,02
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	5,82	5,62	5,58	5,08	5,20
Keuangan	1,64	1,74	2,06	2,63	2,78
Jasa kemasyarakatan	15,62	15,96	17,02	16,65	17,37
Lainnya*)	1,40	1,50	1,61	1,70	1,92
Total	107,41	108,21	111,28	109,67	112,80

*) Mencakup: 1. Pertambangan dan penggalian; 2. Listrik, gas dan air bersih
Dalam satuan: juta orang

Sumber Data Strategis BPS, 2012

Berdasarkan data strategis BPS tahun 2012, Tabel 1.1 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, yaitu mencapai 41,2 juta orang atau sebesar 36,52 persen, disusul sektor perdagangan sebesar

21,30 persen dan pada sektor jasa sebesar 15,40 persen. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 1,63 persen, sedangkan sektor-sektor lainnya pada umumnya mengalami pertumbuhan positif mengikuti pertumbuhan total sebesar 5,39 persen. Namun angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya terhadap sektor pertanian masih relatif sangat besar.

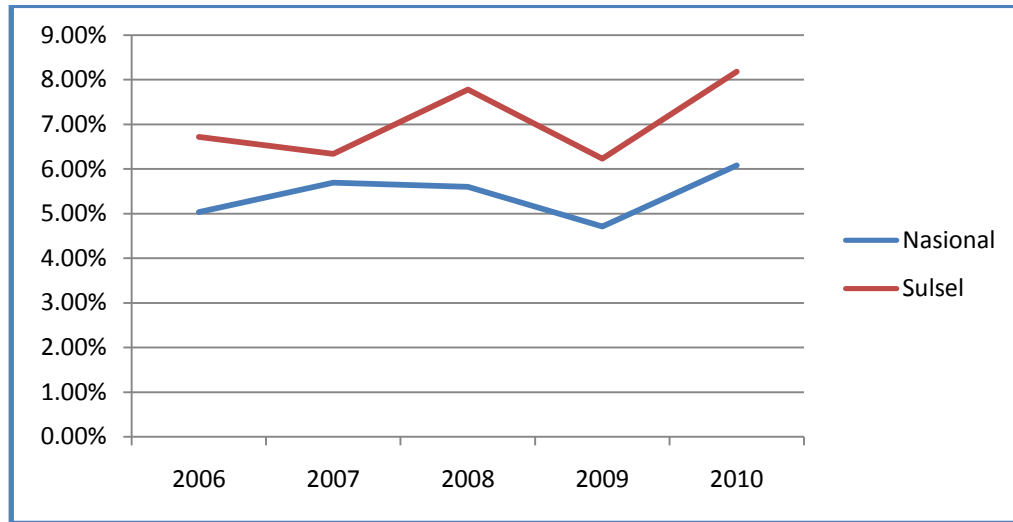
Table 1.2 PDB atas harga berlaku dan harga konstan 2000 menurut lapangan usaha Tahun 2008-semester I-2012

Lapangan usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)					Atas Dasar Harga Constan 2000 (Triliun Rupiah)				
	2008	2009	2010	2011	Smt I- 2012	2008	2009	2010	2011	Smt I- 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	716,7	857,2	985,4	1093,5	604,4	284,6	295,9	304,7	313,7	166,8
2 Pertambangan dan penggalian	541,3	592,1	718,1	886,3	502,1	172,5	180,2	186,6	189,2	96,1
3 Industri pengolahan	1376,4	1477,5	1595,8	1803,5	949,5	557,8	570,1	597,1	634,2	325,8
4 Listrik, gas, dan air bersih	40,9	46,7	49,1	55,7	30,1	15,0	17,1	18,1	18,9	9,8
5 Konstruksi	419,7	555,2	660,9	756,5	410,1	131,0	140,3	150,0	160,1	82,8
6 Perdagangan, hotel, dan restoran	691,5	744,5	882,5	1022,1	549,8	393,8	368,5	400,5	437,3	229,4
7 Pengangkutan dan komunikasi	312,2	353,7	423,3	419,2	262,9	165,9	192,2	218,0	241,3	128,8
8 Keuangan, perumahan dan jasa perusahaan	368,1	405,2	466,6	535,0	290,3	198,8	209,2	221,0	236,1	124,1
9 Jasa jasa	481,9	574,1	654,7	783,3	428,6	193,1	205,4	217,8	232,5	119,8
PDB	4948,7	5606,2	6436,3	7427,1	4027,8	2082,5	2178,9	2313,8	2463,2	1283,4

Sumber Data Strategis BPS, 2012

Sementara itu, besarnya jumlah penduduk yang mengantungkan hidupnya dari bekerja di sektor pertanian tidak sebanding dengan besarnya kontribusi PDB dari sektor pertanian yang hanya sebesar 13,00 persen sebagaimana yang ditunjukkan dalam Table 1.2 Rasio jumlah tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian yang sangat timpang mengakibatkan sebagian besar penduduk Indonesia yang berada di daerah pedesaan terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Alasan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk dan kegiatan produksi pada sektor pertanian di negara berkembang itu cukuplah sederhana saja, yaitu pada tingkat pendapatan yang rendah prioritas pertama setiap individu adalah sandang, pangan dan papan. Rendahnya produktivitas pertanian tidak hanya disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dibandingkan dengan luas tanah yang tersedia, tetapi juga karena teknologi yang digunakan seringkali masih rendah atau bahkan masih primitif, organisasi atau pengelolannya juga buruk, dan kualitas input modal fisik serta manusianya masih sangat terbatas. Keterbelakangan teknologi itu sendiri disebabkan oleh pertanian negara-negara dunia ketiga yang didominasi oleh pertanian kecil nonkomersial. Selain itu, banyak petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Mereka hanya menyewa sebidang tanah garapan yang sempit dari tuan tanah atau menjadi petani penggarap dengan sistem bagi hasil.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 1.1 Perkembangan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2006-2010

Sebagai salah satu wilayah fungsional, Sulawesi Selatan juga merupakan pusat kegiatan ekonomi khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Struktur perekonomian Sulawesi Selatan masih mencirikan sektor tradisional, sebagaimana tampak pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama tahun 2006-2010, sebagaimana terlihat pada gambar 1.1, yang berada di atas pertumbuhan nasional dan terus menunjukkan pertumbuhan positif. Penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3 pada tahun 2009 berasal dari sektor pertanian yaitu sebesar 28,57 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar

16,47 persen; sektor industri berada pada urutan ketiga sebesar 13,67 persen.

Table 1.3 Kontribusi masing masing sektor terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja, tahun 2008-2009*) Sektor listrik/gas/air, pertambangan dan lembaga keuangan

LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)**		Distribusi Tenaga Kerja**	
	2008	2009	2008	2009
Pertanian	29,01	28,57	51,46	49,30
Industri pengolahan	14,01	13,67	5,85	6,66
Perdagangan Hotel & Restoran	5,23	5,62	4,73	5,22
Pengangkutan & Komunikasi	15,79	16,47	18,46	19,76
Jasa jasa	6,47	6,77	11,24	11,25
Lainnya*	11,23	11,22	2,05	2,00

**) Satuan persen

Sumber : Data TNP2K, 2011

Keterbatasan modal pada negara-negara berkembang menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hirschman. Besarnya pembentukan modal tetap bruto di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 hanya sebesar Rp 21,645 triliun atau sekitar 14,99 persen dari PDRB Sulawesi Selatan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah sebesar 14,88 persen yang terdiri atas belanja tidak langsung 52,42 persen dan belanja langsung sebesar 37,52 persen (BPS Sulsel, 2012). Oleh karena itu, menurut Hirschman bahwa sebaiknya investasi

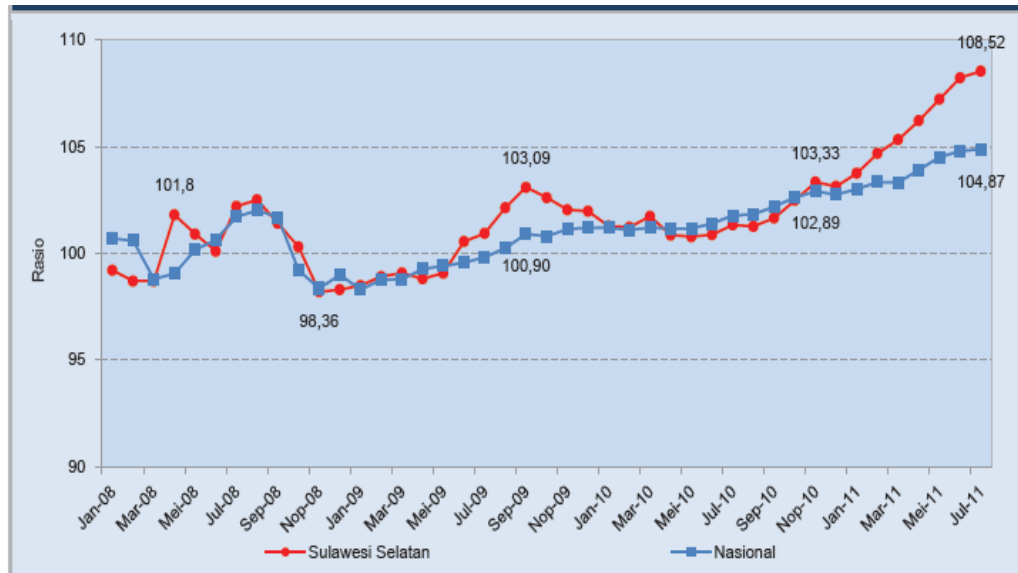
dilakukan pada beberapa sektor atau sektor yang terpilih saja agar dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya digunakan untuk membangun sektor yang lain.

Sebagaimana arah kebijakan pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan 2008-2028 “Menjadikan Wilayah Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan”. Sasaran yang diharapkan dari arah kebijakan tersebut adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita dan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan (RPJPD Sulsel 2008-2028). Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dalam RPJMD Sulsel 2008-2013 telah merumuskan tahap-tahap pembangunan Sulawesi Selatan dengan tetap menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dalam program gerakan optimalisasi jagung, padi dan sapi sebagai program unggulan gubernur Syahrul Yasin Limpo. Program tersebut tidak jauh berbeda dengan program pemerintahan sebelumnya seperti gerakan peningkatan ekspor (Gerateks) pertanian oleh gubernur HZB. Palaguna (1993-2003) dan pengembangan ekonomi masyarakat (Gerbang emas) oleh gubernur Amin Syam (2003-2008).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra pangan nasional, penghasil padi ke empat terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Vivanews, 4/6/2012). Selain itu daerah ini juga

termasuk pengeksport komoditi pertanian lainnya seperti jagung, kakao, kelapa dan udang. Sementara itu, Gubernur Sulawesi selatan H Syahrul Yasin Limpo, mengatakan disela-sela acara *Tudang Sipulung* KTNA di kabupaten Takalar, bahwa sektor pertanian telah menjadi prioritas Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dimana surplus beras 2 juta ton adalah keberhasilan yang telah diraih oleh pemerintahannya, yang selanjutnya akan terus melanjutkan program tersebut dengan target yang lebih tinggi yaitu 3,2 juta ton (Cakrawalaonline, 7/6/2012).

Sekilas tampak kalau kebijakan tersebut telah berhasil memperbaiki kondisi makro ekonomi daerah. Namun, jika dianalisis lebih jauh lagi, akan terlihat bahwa rasio PDRB terhadap distribusi tenaga kerja tidak menggambarkan hal yang positif, dimana rasio sektor pertanian lebih kecil dibandingkan dua sektor lainnya yang masing-masing sebesar 0,83 dan 2,05, sedangkan sektor pertanian hanya sebesar 0,58. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak diikuti oleh besarnya rasio distribusi pendapatan terhadap sektor tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan masih belum berhasil.



Sumber: Badan pusat statistik, 2011

Gambar 1.2. Perkembangan nilai tukar (*year on year*) Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2011

Pekembangan nilai tukar petani (NTP) Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008-2011 menggambarkan tingkat kesejahteraan petani secara keseluruhan. Meskipun mengalami perubahan positif NTP, namun indeksnya sangat kecil. Sebagaimana terlihat pada gambar 1.2, secara umum menunjukkan perubahan NTP Propinsi Sulawesi Selatan hanya bergerak di bawah kisaran 105 mengikuti NTP nasional. Dalam pengertian ini, pertumbuhan sektor pertanian Propinsi Sulawesi Selatan kurang berarti, jika tidak diikuti oleh kenaikan indeks NTP. Gambaran Indeks NTP yang relatif kecil mengindikasikan tingkat produktivitas petani yang rendah yang pada akhirnya juga mempengaruhi terhadap tingkat produktivitas nasional.

Besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada sektor ini membuat pemerintah tetap menjadikan sektor ini sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan ditandai dengan masih besarnya subsidi pemerintah pada sektor tersebut. Studi pembangunan yang diidentikan terhadap negara-negara dunia ketiga yang memiliki keterbelakangan dalam hal kualitas sumber daya manusia dan penguasaan terhadap teknologi, mengharuskan pemerintah mengalokasikan APBN/D yang lebih besar terhadap belanja rutin dibandingkan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi nonpertanian yang relatif lebih besar harus didistribusikan untuk menjaga tingkat produktivitas sektor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan berbagai gambaran permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) sektor pertanian dibandingkan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan?
2. Seberapa besar efek pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda kesempatan kerja sektor pertanian dibandingkan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan?

3. Apakah sektor pertanian memiliki ketergantungan ekspor yang tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) sektor pertanian dibandingkan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis seberapa besar efek pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda kesempatan kerja sektor pertanian dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan.
3. Mengetahui apakah sektor pertanian memiliki ketergantungan ekspor yang tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan.

2. Pemerintah, khususnya badan perencanaan pembangunan daerah dan nasional (Bappeda dan Bappenas) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan.
3. Sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya terkhusus yang mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang lebih luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

A. 1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Ekonomi pembangunan merupakan studi yang membahas pada masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang yang lebih dikenal dengan negara dunia ketiga. Kendati studi perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi Adam Smith sampai Marx dan Kenyes, namun mereka hanya tertarik pada masalah yang pada hakekatnya bersifat statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan kerangka acuan lembaga budaya atau sosial Eropa Barat yang merupakan negara-negara maju. Baru pada tahun empat puluhan dan khususnya sesudah perang dunia II, para ahli ekonomi mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah negara terbelakang.

Pengalaman pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, ketika banyak di antara negara-negara dunia ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama itu.

Banyak ekonom dan perumus kebijakan mulai mempertimbangkan untuk mengubah strategi guna mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak seperti tingkat kemiskinan absolut yang semakin parah ketimpangan distribusi pendapatannya makin mencolok, dan tingkat pengangguran yang terus melonjak. Pada dekade tahun 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan tingkat ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Penggantian atau penyesuaian definisi pembangunan ekonomi yang kini lebih didasarkan pada konsep “redistribusi hasil pertumbuhan” itu merupakan slogan yang populer pada masa itu. Selama dekade tahun 1960-an dan dekade 1970-an, sejumlah negara berkembang berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cukup tinggi. Namun masalah-masalah pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan pendapatan riil dari 40 persen penduduknya paling miskin tidak banyak mengalami perbaikan atau bahkan dalam banyak kasus justru semakin buruk (Todaro & Smith, 2006).

Fenomena pembangunan atau adanya situasi keterbelakangan yang kronis sesungguhnya bukan semata-mata merupakan persoalan ekonomi atau sekedar soal pengukuran tingkat pendapatan, masalah ketenagakerjaan, atau penaksiran tingkat ketimpangan penghasilan secara kuantitatif. Keterbelakangan merupakan sebuah kenyataan riil dalam

kehidupan sehari-hari. Bank dunia dalam sebuah publikasi resminya *World Development Report* (Todaro & Smith,2006) mengatakan bahwa tantangan utama dalam pembangunan adalah bagaimana memperbaiki kualitas kehidupan. Meskipun syarat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik diukur dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi namun hal itu hanya merupakan salah satu syarat dari sekian banyak syarat yang ada, antara lain: pendidikan yang lebih baik; peningkatan standar kesehatan dan nutrisi; pemberantasan kemiskinan; perbaikan kondisi lingkungan hidup; pemerataan kesempatan; peningkatan kebebasan individu; dan pelestarian ragam kehidupan budaya. Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan.

Pemenang Hadiah Nobel untuk bidang ekonomi tahun 1998, Amartya Sen dalam Todaro dan Smith (2006), berpendapat bahwa untuk dapat memahami konsep kesejahteraan manusia secara umum, dan kemiskinan secara khusus, kita harus berfikir lebih dari sekedar ketersediaan komoditi-komoditi dan memperhatikan kegunaannya. Hal ini membantu memperjelas apa yang disebut oleh Sen sebagai fungsi, yaitu apa yang dapat dilakukan seseorang terhadap suatu komoditi dengan karakteristik-karakteristik tertentu yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang tersebut. Kebebasan memilih, atau

kontrol yang dimiliki seseorang terhadap hidupnya sendiri, adalah aspek utama dalam memahami kesejahteraan secara mendalam. Aspek sosial digunakan untuk mengukur pembangunan sosial negara (Perkin, Radelet, Snodgrass, Gill, & Romer, 2001), diperkenalkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 1990, yang mengukur tingkat harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan perkapita.

Studi pembangunan ekonomi menurut Jhingan (2010) merupakan suatu cabang dari disiplin ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu ekonomi (*economic*) dan Ilmu ekonomi politik (*political economic*), studi ini dikembangkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, yang mengkaji secara lebih sistematis permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang umumnya merupakan negara-negara yang baru merdeka. Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Akan tetapi beberapa ahli ekonomi tentunya, seperti Schumpeter dan Nyonya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedangkan pertumbuhan mengacu pada masalah negara maju. Perkembangan menurut Schumpeter (Jhingan, 2010), adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada

sebelumnya; sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Nyonya Hicks dalam Jhingan (2010) mengemukakan, masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal, sedang masalah negara maju terkait pada pertumbuhan, karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu.

Menurut Todaro dan Smith (2006) dalam bukunya “Pembangunan Ekonomi” bahwa perbandingan ruang lingkup ilmu ekonomi pembangunan terhadap ilmu ekonomi tradisional dan ilmu politik, dimana ilmu ekonomi tradisional (*traditional economics*) memusatkan perhatiannya pada pengalokasian sumber daya yang langka secara efisien, serta upaya-upaya untuk memanfaatkan pertumbuhan optimal sumber-sumber daya tersebut dari waktu ke waktu agar dapat menghasilkan sebanyak mungkin barang dan jasa. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi tradisional di sini adalah ilmu ekonomi klasik dan neoklasik. Cakupan ilmu ekonomi politik (*political economy*) lebih luas dari jangkauan ilmu ekonomi tradisional. Fokusnya antara lain adalah proses-proses sosial serta institusional yang memungkinkan kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik mempengaruhi alokasi sumber daya produktif yang persediaannya selalu terbatas (langka), sekarang atau masa yang akan datang, baik secara khusus untuk keuntungan sendiri atau

kelompok maupun secara umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Ilmu ekonomi pembangunan (*development economics*) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi. Selain memperhatikan masalah efisiensi alokasi sumber daya produktif yang langka (atau yang tidak terpakai) serta kesinambungan pertumbuhan dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi pembangunan juga memberi perhatian pada mekanisme-mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan, baik yang terkandung dalam sektor swasta maupun yang terkandung dalam sektor publik.

Berdasarkan pandangan dari berbagai tokoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mencakup aspek multidimensional dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengetasan kemiskinan, serta adanya perubahan mendasar dari struktur sosial, politik dan kelembagaan.

A. 2. Teori Pembangunan Ekonomi

a. Aliran Ekonomi Klasik

Adam Smith, tokoh utama mashab klasik, dengan karya utamanya yang sangat terkenal *The Wealth of Nation* terbit pada 1776. Menurut Smith proses pertumbuhan itu bersifat mengumpul (kumulatif), artinya apabila timbul kemakmuran sebagai akibat dari kemajuan di bidang pertanian,

industri manufaktur dan perdagangan akan menarik pada akumulasi modal, kemajuan teknologi, pertumbuhan populasi dan perluasan pasar serta pembagian kerja secara terus-menerus. Kondisi ini oleh Smith disebut dengan “situasi progresif”. Pada akhirnya akan sampai pada titik kelangkaan sumber daya yang akan menghentikan pertumbuhan tersebut. Smith mengatakan bahwa negara yang telah mencapai titik ini tidak akan dapat maju lebih jauh lagi bahkan akan mengalami kemunduran. Upah buruh dan keuntungan akan berada pada titik terendah. Penurunan tersebut yang terus menerus mengakibatkan investasi mengalami penurunan hingga perekonomian membentuk garis stasioner (Jhingan, 2010).

Seperti halnya Smith, David Ricardo, dengan bukunya *Principle of Political Economy and Taxation* terbit pada 1817, konsepnya didasarkan pada beberapa asumsi dasar di antaranya (Adisasmita, 2013; Jhingan, 2010): pertama, seluruh tanah digunakan untuk produksi. Kedua, *the law of diminishing returns* berlaku bagi tanah. Ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Keempat, buruh dan modal adalah input yang bersifat variabel. Berdasarkan asumsi tersebut Ricardo membangun teorinya tentang saling keterkaitan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan pendapatan nasional dibagikan berupa sewa, laba dan upah. Menurut Ricardo, pemupukan modal merupakan keuntungan, sebab keuntungan merupakan kekayaan yang selisinya membentuk modal. Pemupukan modal sangat bergantung pada dua

faktor, yaitu kemampuan untuk menabung dan kemauan untuk menabung. Kemampuan untuk menabung diukur dari pendapatan bersih masyarakat yang berasal dari selisih keseluruhan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya hidup minimum buruh. Sedangkan kemauan untuk menabung diukur dari besarnya surplus, semakin besar surplus semakin besar kemauan untuk menabung. Tuan tanah dan pemilik modal menanamkan modalnya berdasarkan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh.

Keadaan stasioner menurut Ricardo (Jhingan,2010) adalah kecendrungan alamiah sehingga negara akan mencapai tahap stasioner apabila pemupukan modal meningkat sebagai akibat meningkatnya keuntungan maka jumlah keseluruhan produksi meningkat sehingga upah juga meningkat yang pada gilirannya akan menaikkan permintaan gandum dan harganya. Menurut Ricardo, pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara konsumsi dan produksi. Makin kecil rasio konsumsi produksi, maka pertumbuhan ekonomi dapat terjadi lebih cepat. Modal dapat ditingkatkan dengan menaikkan produksi atau mengurangi konsumsi. Dengan adanya penggunaan mesin, peningkatan keterampilan, pembagian kerja akan baik, penemuan pasar yang baru dapat membuat banyak pertukaran yang menguntungkan. Dengan meningkatnya upah, penduduk dan pada gilirannya menaikkan permintaan gandum dan harganya mengakibatkan permintaan jumlah tanah yang subur akan meningkat. Pada akhirnya sewa tanah mengalami peningkatan yang mengakibatkan berkurangnya

keuntungan dan rendahnya upah hingga jatuh pada tingkat minimum, bahkan keuntungan berada pada titik nol.

Thomas Robert Malthus yang selalu dikaitkan dengan teori kependudukan, menulis buku dengan judul *Principle of Political Economy* yang terbit pada 1820. Menurut Malthus proses pembangunan tidak terjadi dengan sendirinya, diperlukan berbagai upaya yang konsisten untuk mencapai tingkat tinggi dari pembangunan (Adisasmita,2013; Jhingan,2010). Perekonomian tidak mengalami keadaan stasioner, seperti yang digambarkan oleh Smith dan Ricardo, namun mengalami kemerosotan yang berulang kali sebelum mencapai tingkat tersebut.

Malthus menitikberatkan perekonomian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari produk tersebut, tetapi kesejahteraan suatu negara tidak selalu mengalami peningkatan yang proporsional pada nilai. Terkadang peningkatan tersebut bisa terjadi atas dasar penyusutan aktual pada komoditi.

Dalam bukunya tersebut Malthus lebih realistis dalam menganalisis dibandingkan dalam bukunya *Essay of Population*. Menurut Malthus (Jhingan,2010), pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika akumulasi modal meningkat, permintaan tenaga kerja juga

mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan penduduk tidak meningkatkan kesejahteraan. Pertambahan penduduk dapat meningkatkan kesejahteraan jika pertumbuhan penduduk meningkatkan permintaan efektif (*effective demand*).

Produksi dan distribusi menjadi unsur utama kesejahteraan (Adisasmitha,2013). Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara *gross national product* (GNP) potensial dan *gross national product* (GNP) aktual. Problem pokoknya adalah bagaimana mencapai tingkat *gross national product* (GNP) potensial yang tinggi. Besarnya *gross national product* (GNP) potensial menurut Malthus adalah tergantung pada tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. Bila keempat faktor ini digunakan secara proporsional maka akan memaksimalkan produksi dua sektor utama perkonomian yaitu sektor pertanian dan sektor industri secara berkesinambungan. Akumulasi modal, kesuburan tanah dan kemajuan teknologi adalah penyebab utama peningkatan produksi pertanian maupun produksi industri. Selain itu Malthus juga menekankan pentingnya faktor nonekonomi dalam pembangunan ekonomi, yang termasuk dalam politik dan moral.

Malthus tidak sependapat dengan hukum Say (Jhingan,2010) yang mengatakan bahwa dalam pasar bebas tidak mungkin terjadi kelebihan produksi (*supply creates its own demand*). Dalam kenyataan terdapat kelebihan komoditas di pasar dibandingkan dengan permintaan, hal ini berarti

terdapat kekurangan permintaan efektif (*effective demand*). Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, Malthus mengemukakan beberapa saran (Adisasmitha,2013), yaitu: pertumbuhan berimbang antara sektor pertanian dan sektor industri; menaikkan permintaan efektif, yang dilaksanakan dengan pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah.

Sama halnya dengan beberapa tokoh sebelumnya, Jhon Stuart Mill (Admisasmitha, 2013; Jhingan,2010) menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja merupakan dua faktor produksi yang asli, sedangkan modal adalah persediaan yang dikumpul dari produksi turunan. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibandingkan angkatan kerja. Kesejahteraan terdiri dari peralatan, mesin, dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif inilah yang merupakan penciptaan kesejahteraan dan akumulasi modal. Laju akumulasi modal merupakan fungsi dari bagian angkatan kerja yang dipekerjakan secara produktif. Mill percaya pada teori penduduk Malthus. Pembatasan penduduk merupakan langkah yang penting sehingga dapat menikmati hasil kemajuan teknologi dan akumulasi modal.

Mill dalam Adisasmitha (2013) mengatakan bahwa Laju akumulasi modal tergantung pada, (1) Jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan atau besarnya sisa hasil usaha, (2) Kuatnya kecenderungan untuk menabung.

Modal adalah hasil dari tabungan dan tabungan berasal dari penghematan konsumsi saat ini demi kepentingan konsumsi di masa yang akan datang. Tabungan adalah pengeluaran yang menggambarkan keyakinan Mill pada hukum Say. Tidak adanya kemajuan di sektor pertanian dan bertambahnya penduduk berdasarkan laju pertumbuhan Malthus yang lebih tinggi daripada laju akumulasi modal, maka tingkat laba berada pada tingkat terendah. Untuk mencegah penurunan laba tersebut, dilakukan; pertama, perbaikan teknik, kedua, peningkatan perdagangan luar negeri, ketiga mengeksport modal ke negara jajahan untuk memproduksi barang konsumsi untuk keperluan negara asal.

Keadaan stasioner akan terjadi dalam waktu dekat. Keadaan stasioner pada akhirnya akan membawa ke arah perbaikan distribusi pendapatan dan upah bagi tenaga kerja. Hanya mungkin terjadi dengan melakukan pengendalian jumlah kelas pekerja melalui kebiasaan berhemat dan melalui pendidikan. Adanya peran pemerintah, meskipun seminimal mungkin dalam perekonomian, dalam pandangan Mill di antaranya memperbaiki redistribusi kepemilikan sarana produksi dengan rencana seperti pembagian laba dan kerja sama.

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan pandangan Smith, Ricardo hingga Mill yang lebih dikenal sebagai aliran klasik atau teori klasik. *Pertama*, kebijakan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik percaya pada kemampuan pasar bebas dalam memecahkan masalah masalah pembangunan. Peran

pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian merupakan poin utama dalam teori ini. *Kedua*, pemupukan modal. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemupukan modal memainkan peran yang penting, sehingga tabungan dalam jumlah yang besar menjadi sumber investasi. *Ketiga*, keuntungan sebagai rangsangan bagi investasi. Agar dapat menabung dan meningkatkan investasi, investasi harus mampu dirangsang melalui keuntungan. *Keempat*, keadaan stasioner. Bahwa akan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Malthus selanjutnya menunjukkan adanya korelasi khusus antara pertumbuhan penduduk dan persediaan makanan. Malthus mengatakan bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka ia akan melampaui pertumbuhan modal dan juga sarana bagi kebutuhan hidup.

b. Teori Karl Marx tentang Pembangunan Ekonomi

Berbeda halnya dengan aliran klasik, Marx lebih dikenal dengan aliran kiri yang lebih banyak mengkritik teori-teori ekonom klasik. Marx menyumbang kepada teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal, yaitu: dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti lebih sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan akhirnya menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi

terencana. Berdasarkan teori nilai lebih, Marx menganggap tenaga lebih memperbesar keuntungan kapitalis. Kapitalis memaksimalkan keuntungan melalui tiga cara yaitu (1) dengan memperjuangkan jam kerja, (2) dengan mengurangi jumlah jam yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya, (3) dengan meningkatkan produktivitas (Admisasmitha, 2013).

Sebetulnya skema bagian Marx yang bisa diterapkan di negara-negara terbelakang. Negara seperti itu terutama memiliki perekonomian yang dualistis, terdiri dari sektor kapitalis dan sektor pertanian pangan dan usaha skala kecil yang bisa dikatakan mewakili "dua bagian dari Marx. Sektor kapitalis inilah yang lebih banyak menghasilkan surplus ekonomi dibandingkan dengan sektor pangan. Pembangunan ekonomi dapat dipacu lebih cepat dengan mereorganisasikan dan memperluas sektor kapitalis dan mengubah sektor pangan menjadi sektor kapitalis dalam rangka meningkatkan surplus ekonomi. Proses ini membutuhkan perencanaan industrialisasi dan peningkatan persediaan komoditi pertanian untuk memenuhi permintaan sektor kapitalis yang semakin berkembang tersebut.

c. Teori Keynes

Menurut Keynes dalam Adisasmitha (2013) bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total (*total employment*). Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan dan sebaliknya semakin kecil pendapatan nasional semakin kecil volume tenaga kerja yang dihasilkan. Besarnya volume kesempatan kerja tergantung pada

permintaan efektif, yang menentukan tingkat keseimbangan kesempatan kerja dan pendapatan. Permintaan efektif terdiri atas permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan efektif tergantung pada kecenderungan untuk mengkonsumsi. Jika volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi maka akan menyebabkan penurunan permintaan agregat, yang lebih rendah dari harga penawaran (Jhingan,2010). Akibatnya pendapatan dan kesempatan kerja turun pada titik terendah hingga dimana adanya investasi. Jadi letak perbedaan antara kesempatan kerja dan pendapatan ada pada besarnya investasi. Volume investasi bergantung pada efisensi marginal dari modal dan suku bunga.

A. 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Bangsa-bangsa di dunia sudah lama menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama perekonomian, masyarakat ingin mengetahui sumber dari pertumbuhan ekonomi, apakah kenaikan standar kehidupan yang dinikmati masyarakat selama ini disebabkan oleh banyaknya modal yang tersedia atau karena kemajuan teknologi, pertanyaan lain adalah apa yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk memperbaiki prestasi ekonominya. Pertanyaan pertanyaan tersebut merupakan masalah utama yang dibahas dalam teori dan kebijakan pertumbuhan ekonomi.

a. Model Perubahan Struktural Lewis

Salah satu model dasar (model teoritis) pembangunan yang paling terkenal, yaitu memusatkan perhatian pada transformasi struktural (*structural transformation*) suatu perekonomian subsisten, dirumuskan oleh W. Athur Lewis, salah satu ekonom besar. Model dua sektor Lewis, yang diakui sebagai teori umum yang membahas teori umum yang membahas proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an.

Menurut model Lewis perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor (Todaro & Smith,2006), yakni (1) sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja yang sama dengan nol. Lewis mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian maka sektor tersebut tidak akan kehilangan outputnya (2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi penampung tenaga kerja yang ditransfer dari sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Perhatian utama model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja, pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan di sektor modern (Jhingan,2010). Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja dimungkinkan oleh adanya peluasan output pada sektor tersebut. Adapun laju dan kecepatan peluasan tersebut ditentukan oleh

tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Yang terakhir, tingkat upah di sektor industri perkotaan (sektor modern) di asumsikan konstan dan berdasarkan suatu premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi rata-rata upah di sektor pertanian subsisten tradisional. Lewis berasumsi bahwa tingkat upah di daerah perkotaan sekurang-kurangnya harus 30 persen lebih tinggi dari pada rata-rata pendapatan di daerah-daerah pedesaan untuk memaksa para pekerja pindah dari desa ke kota. Karena pada tingkat upah di daerah perkotaan yang konstan, maka kurva penawaran tenaga kerja pedesaan dianggap elastis sempurna.

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Sejak pertengahan tahun 1950an berkembang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dipelopori oleh R.M. Solow yang menulis artikel "*Contribution to The Theory of Economic*, pada tahun 1956 yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli ekonomi lainnya, di antaranya Edward Phelps, Harry Johnson, dan J.E. Meade.

Dalam analisis neoklasik, permintaan masyarakat tidak menentukan lajunya pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Neoklasik beranggapan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa (Adisasmitha, 2013; Perkin et al,

2001). Solow mengatakan bahwa determinan penting dari pertumbuhan adalah *technical progress*, kenaikan penawaran tenaga kerja, dan akumulasi modal. Determinan yang paling penting dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perkapita adalah *technical progress* dan akumulasi modal (Dornbusch,2008).

c. Teori Pertumbuhan Scumpeter: Peranan Pengusaha dalam Pembangunan

Dalam beberapa dasawarsa pertama abad ke-20, salah satu di antaranya yang terkemuka adalah Joseph Schumpeter, menulis salah satu bukunya yang terkenal *The Theory of Economic Development*, yang terbit pada tahun 1911. Salah satu pendapat dari Schumpeter yang penting, yang selanjutnya merupakan landasan bagi teori pembangunannya, adalah keyakinannya sistem kapitalis merupakan sistem ekonomi yang paling tepat untuk melakukan pembangunan ekonomi yang pesat. Schumpeter tidak sependapat dengan pandangan ahli ekonomi klasik yang menganggap bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu program yang paling gradual dan berjalan secara harmonis. Menurutny, penambahan dalam pendapatan nasional dari masa ke masa perkembangan sangat tidak stabil dan keadaannya ditentukan oleh besarnya peluang pembentukan modal yang menguntungkannya yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Ketidakstabilan ini berarti bahwa dalam proses pembangunan ekonomi,

kemakmuran dan depresi akan timbul secara silih berganti. Pada suatu masa tertentu perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pada masa lainnya pengangguran yang serius akan terjadi (Adisasmita, 2013).

Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif dan golongan *entrepreneur*, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk memperoleh nilai tambah dari faktor produksi tersebut. Mereka merupakan masyarakat yang menciptakan inovasi atau penemuan baru dalam perekonomian (Adisasmita, 2013).

Pandangan Schumpeter mengenai jalannya proses pembangunan ekonomi, dalam keadaan tidak terjadi perkembangan atau stasioner, tidak terdapat perkembangan penduduk, tidak ada penambahan modal baru, dan pengangguran baru. Dalam keadaan tersebut terdapat peluang untuk melakukan pembaharuan yang menguntungkan. Kondisi ini akan disadari oleh pengusaha untuk melakukan penanaman modal baru untuk melaksanakan dan menciptakan berbagai pembaharuan. Pada tahap awal hanya ada sedikit pengusaha yang masuk dan pada akhirnya akan diikuti oleh banyak pengusaha lainnya, yang terdorong oleh keuntungan pada sektor tersebut, disertai dengan penanaman modal yang akan mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi yang tinggi.

**d. Teori Harrod-Domar: Syarat untuk Mencapai Pertumbuhan Mantap
(*Stasionary Growth*)**

Teori Harro-Domard merupakan peluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi nasional dan masalah penggunaan tenaga kerja. Berbeda halnya dengan Keynes yang berbicara pertumbuhan dalam jangka pendek, analisis Harrod-Domar bertujuan menutupi kelemahan analisis Keynes. Pada dasarnya, teori Harrod-Domar berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan yang mantap atau *steady growth*, merupakan pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam perekonomian (Adisasmitha, 2013).

Harrod-Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli ekonomi terdahulu yang menanamkan tentang peranan pembantuan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi berbeda dengan pandangan kaum klasik dan Keynes, yang memberikan pada satu aspek saja. Teori Harrod-Domard memperhatikan (1) fungsi dari pembentukan modal dari kaum klasik, dan (2) tingkat pengeluaran masyarakat dari Keynes. Teori Harrod-Domar bersesuaian dengan pendapat Keynes yang menganggap bahwa penambahan dalam kesanggupan memproduksi tidak secara sendirinya akan menciptakan penambahan produksi dari kenaikan pendapatan nasional. Pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh penambahan dalam kapasitas memproduksi tetapi oleh

kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun kapasitas memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi tercapai, apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan bila dibandingkan pada masa sebelumnya. Bertitik tolak dari pandangan ini, analisis Harrod-Domar bertujuan untuk menunjukkan kemampuan masyarakat yang bertambah dari masa ke masa akan selalu digunakan (Adisasmitha, 2013). Teori pertumbuhan Harrod-Domar mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan ditentukan secara bersama-sama oleh besarnya rasio tabungan nasional, serta rasio modal-output nasional (Todaro & Smith, 2006)

e. Teori Pembangunan Seimbang

Istilah pembangunan seimbang (*balanced development*) diciptakan oleh Ragnar Nurkse (1960), tetapi teori tersebut pertama kali dikemukakan oleh Rosentein Rodam (1957), yang beranggapan bahwa melaksanakan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di daerah kurang berkembang dengan lebih cepat dari pada di daerah lebih kaya. Dalam pembangunan seimbang harus dilakukan pembangunan berbagai jenis industri yang mempunyai kaitan erat satu sama lain secara serentak, sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi, misalkan pengangguran di sektor pertanian (*disguised unemployment*) dipekerjakan dalam suatu industri, produksi suatu

industri tersebut meningkat, pendapatan pekerja bertambah, sebagian dibelanjakan untuk membeli berbagai barang hasil produksi industri lain dan sebagian sisanya digunakan untuk membeli bahan makanan hasil sektor pertanian, produksi industri secara luas meningkat. Di samping itu, produksi sektor pertanian meningkat pula, maka terjadi pembangunan yang seimbang meliputi sektor industri dan sektor pertanian (Adisasmita,2013; Perkin, et al,2001).

Pendapat Nurkse tidak banyak berbeda dengan Rosenstein-Rodan dalam mengemukakan alasan tentang perlunya melaksanakan program pembangunan seimbang dalam pembangunan ekonomi bukan hanya menghadapi kesuksesan dalam memperoleh modal yang diperlukan tetapi juga dalam mendapatkan pasaran untuk barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai industri yang akan dikembangkan. Penanaman modal sangat rendah karena rendahnya pendapatan riil masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas, dapat dikatakan bahwa dorongan untuk melakukan penanaman modal dibatasi oleh luasnya pasar. Faktor yang terpenting yang menentukan luasnya pasar adalah tingkat produktivitas (Adisasmita,2013).

Teori pembangunan seimbang menganjurkan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri dilaksanakan bersama-sama secara simultan secara serentak dan serempak. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan karena negara-negara berkembang sebagian besar penduduk berdomisili dan bermata pencaharian di sektor pertanian, nilai produksi sektor

pertanian mempunyai peranan besar dalam produk domestik bruto (PDB). Sektor industri diharapkan menjadi soko guru perekonomian, yaitu memberikan lapangan kerja banyak, memberikan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa negara, memperlunak dampak turunnya harga komoditas pertanian di pasar internasional, dan akan memperkokoh struktur perekonomian, meskipun pada dewasa ini kontribusinya terhadap nilai pendapatan dalam negeri masih kecil (Adisamsitha, 2013; Jhingan,2010).

Dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang seimbang terutama ditekankan pada sektor pertanian dan sektor industri diharapkan akan memperkokoh struktur perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Kesimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Penerimaan ekspor adalah sumber penting untuk membiayai pembangan; impor meningkat begitu produksi dan tenaga kerja meluas, dan perdagangan dalam negeri sendiri membutuhkan peningkatan impor untuk bahan-bahan dan peralatan yang perlu. Untuk membayar peningkatan impor sambil memberi kemungkinan pada ekspor membiayai pembangan sebanyak mungkin, negara tidak dapat memperluas perdagangan dalam negeri dengan mengorbankan perdagangan luar negeri. Sektor dalam negeri

harus dapat tumbuh seimbang dengan perdagangan luar negeri. Nurkse melihat bahwa pertumbuhan berimbang adalah pondasi kuat untuk perdagangan internasional dan juga suatu cara untuk mengatasi kekosongan pada batas luar.

f. Teori Pembangunan Tidak Seimbang

Berbeda dengan teori pertumbuhan seimbang, teori pertumbuhan tidak seimbang menyatakan bahwa tidak ada negara yang memiliki modal dalam jumlah yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di semua sektor. Oleh karena itu, investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang telah terpilih agar hasilnya cepat berkembang, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor yang lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur-angsur akan tumbuh dan berkembang dari tidak seimbang menuju ke arah pertumbuhan yang seimbang. Ahli ahli ekonomi ini di antaranya C.P. Kindleberge, H.W. Singer dan Albert Hirschman (Jhingan, 2010; Perkin, et al,2001). Pendukung strategi pertumbuhan tidak seimbang lebih menyukai investasi pada sektor terpilih dari pada investasi secara serentak pada semua sektor ekonomi. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang-peluang investasi baru. Hal ini hanya dapat dicapai dengan cara membuat ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja.

Hirschman menganjurkan pendirian industri tahap akhir lebih dahulu. Dalam pembuatan industri, suatu negara sedang berkembang tidak perlu

mengusahakan semua tahap produksi secara serentak, tapi ia dapat mengimpor pabrik “*converting, assembling dan mixing*” bagi sentuhan akhir, produk yang hampir jadi. Industri tahap akhir juga dikenal sebagai industri kantong impor (*import enclave industries*). Meskipun demikian, industri ini jauh berbeda dengan industri kantong ekspor (*export enclave industries*). Industri kantong ekspor terpaksa menghasilkan dampak kaitan maju bagi perekonomian. Akan tetapi industri kantong impor tersebut memberikan dampak kaitan mundur yang sangat luas dan mendalam. Dampak kaitan mundur adalah penting tidak hanya dari produksi sekunder dan produksi primer. Dampak kaitan mundur yang merupakan hasil kombinasi berbagai industri tahap akhir dalam suatu negara adalah penting lagi. Kaitan mundur lahir karena kenaikan permintaan. Oleh karena itu, permintaan atas barang-barang yang sekali waktu paling ekonomis jika diimpor mungkin pada waktu tertentu meningkat begitu besar sehingga membenarkan produksi tahap akhir di dalam negeri. Dengan kata lain, sampai permintaan pada batas tertentu, akan lebih menguntungkan untuk memproduksi di dalam negeri, setelah batas itu tercapai lebih menguntungkan untuk mengimpornya. Pada tahap pra-natal tidak perlu memberikan jenis perlindungan industri bayi sampai industri tersebut mapan. Pemberian kelonggaran pajak merupakan piranti yang sesuai bagi perlindungan sementara semacam ini. Hirschman berpendapat bahwa negara terbelakang tidak memberikan peranan penting kepada ekspor di dalam pembangunan ekonomi mereka. Mereka sering

memperlakukan ekspor seperti anak tiri, tapi memang tidak ada pilihan nyata antara promosi ekspor dan substitusi impor. Yang mana impor merupakan satu-satunya cara praktis untuk mencapai yang kemudian itu.

Hirschman meringkaskan strategi pembangunan ekonominya dalam ungkapan berikut ini, pembangunan ekonomi secara khas berjalan menurut lintasan pertumbuhan tak berimbang bahwa keseimbangan pulih sebagai akibat dari tekanan, rangsangan dan paksaan; bahwa lintasan efisien ke arah pembangunan ekonomi mungkin agak tak teratur dan dipenuhi dengan kemacetan dan kekurangan keterampilan, fasilitas, jasa dan produksi; bahwa pembangunan industri akan berlanjut sebagian besar melalui kaitan mundur yakni dari industri terakhir ke industri menengah dan industri dasar.

Meskipun berbeda dalam pendekatan kedua doktrin pertumbuhan tersebut, namun mempunyai dua masalah yang sama, yaitu (1) berhubungan dengan peranan negara, dan (2) keterbatasan penawaran modal. Diperlukan peranan negara dan tersedianya modal untuk investasi (Adisasmita,2013).

A. 4. Peranan Sektor Pertanian terhadap Perekonomian

Negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran, dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap tetapi berkesinambungan, yakni dari sistem perekonomian subsisten ke sistem perekonomian yang terdeverisifikasi dan terspesialisasi. Pertanian

subsisten sebagian besar output dikonsumsi sendiri oleh keluarga petani, hanya sebagian kecil saja yang dijual atau diperdagangkan di pasar lokal. Dalam kenyataannya, sampai sekarang pola pertanian ini di sebagian besar negara-negara berkembang masih berada pada tahap subsisten. Meskipun teknologi produksi yang digunakan masih banyak yang terbelakang dan pengarahannya yang salah arah dari para tenaga ahli asing menimbulkan penolakan dari petani untuk melakukan perubahan situasi yang dianggap sebagai sikap inkompetensi atau irasional, fakta masih adanya hal-hal yang bersifat statis dari lingkungan petani, ketidakpastian yang mengelilingi mereka, kebutuhan untuk memenuhi tingkat output minimum bagi kelangsungan hidup, dan adat sosial yang kaku dimana mereka berada, namun para petani di negara-negara berkembang masih bersikap dan bertindak rasional secara ekonomi bila diperhadapkan pada pemilihan kesempatan alternatif (Perkin, et al,2001).

Ada beberapa sumbangan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi (Jhingan,2010) dalam hal: *pertama*, penyediaan surplus pangan kepada penduduk yang semakin lama semakin meningkat. *Kedua*, meningkatkan permintaan pada produk industri, sehingga dapat mendorong perluasan sektor sekunder dan tersier. *Ketiga*, meningkatkan devisa barang-barang impor modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian. *Keempat*, meningkatkan pendapatan penduduk desa. *Kelima*, memperbaiki kesejahteraan penduduk pedesaan.

Sektor pertanian memiliki karakteristik yang membuat sektor ini begitu penting dalam persediaan input, sebagaimana teori-teori produksi faktor tradisional neoklasik yang menganggap lahan bersifat tetap, dan tenaga kerja merupakan satu-satunya input variabel. Secara spesifik, faktor-faktor tersebut menyediakan dasar pemikiran untuk melihat rendahnya produktivitas pertanian tradisional di negara-negara berkembang. Dengan adanya surplus tenaga kerja di sektor ini memberikan kontribusi terhadap kebutuhan tenaga kerja sektor industri. Pergeseraan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa di perkotaan merupakan hal yang mungkin terjadi yang ditandai dengan makin bertambahnya populasi di daerah perkotaan. Jika ada pelarangan perpindahan tenaga kerja sektor pertanian akan membuat pembangunan ekonomi mengalami ketimpangan (Jhingan,2010; Perkin, et al,2001; Todaro & Smith,2006).

Sektor pertanian juga dapat menjadi sebuah sumber daya modal bagi pertumbuhan ekonomi modern. Beberapa penulis mengatakan bahwa sumber daya sektor pertanian menjadi sumber utama bahkan sumber daya tunggal pada awal pembangunan (Perkin, et al, 2001). Kenaikan daya beli daerah pedesaan, sebagai akibat kenaikan surplus pertanian, merupakan perangsang kuat terhadap perkembangan industry. Rendahnya daya beli daerah pedesaan terhadap barang-barang modal menandakan rendahnya tingkat produktivitas dari sektor pertanian. Rendahnya investasi tersebut sebagai akibat dari sempitnya pasar. Meningkatnya daya beli daerah

pedesaan akan meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang manufaktur dan terjadinya perluasan pasar. Peningkatan permintaan terhadap input sektor pertanian akan mendorong perluasan sektor industri lebih luas lagi (Jhingan,2010).

Kebanyakan negara berkembang melakukan spesialisasi dalam menghasilkan hasil pertanian ekspor. Meningkatnya produktivitas di sektor ini akan menaikkan ekspor selanjutnya meningkatkan penerimaan devisa. Dengan adanya surplus pada pertanian mendorong pembentukan modal jika barang-barang yang diimpor dengan menggunakan cadangan devisa tersebut. Menurut Johnson dan Mellor dalam Jhingan (2010) bahwa peningkatan produktivitas pada sektor pertanian merupakan kombinasi antara penurunan input, penurunan harga hasil pertanian dan peningkatan penerimaan pertanian. Buruh sebagai input utama dapat menjadi sumber pembentukan modal apabila di daerah pertanian buruh dikurangi dan dipekerjakan pada nonpertanian.

A. 5. Input-output Analisis

Model Input-output (I-O) merupakan salah satu model yang dapat memaparkan dengan jelas bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi itu terjadi adalah yang pertama kali diperkenalkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930-an, yang kemudian mendapat Nobel pada tahun 1973. Melalui

model ini dapat ditunjukkan seberapa besar aliran keterkaitan antarsektor dalam suatu perekonomian. Model Input-output merupakan model yang berbentuk tabel matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar suatu sektor dengan sektor yang lainnya, dalam suatu kegiatan perekonomian di suatu wilayah dalam kurun periode tertentu. Input suatu industri adalah output industri yang lainnya Input produksi dari sektor A misalkan, merupakan output dari sektor B, dan sebaliknya input dari sektor B merupakan output dari sektor A, yang pada akhirnya keterkaitan antarsektor akan menyebabkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam perekonomian. Dalam hubungan ekonomi yang sederhana ini jelaslah terlihat pengaruh yang bersifat timbal balik antara dua sektor tersebut. Hubungan inilah yang dikatakan hubungan input-output (Daryanto & Hafizrianda,2010; Miller & Blair,1985; Nursini,2012; Stimson, Stough & Roberts, 2006).

Dalam model I-O pengaruh interaksi ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis (Daryanto & Hafizrianda,2010; Stimson, Stough & Roberts,2006) yaitu: (1) pengaruh langsung, (2) pengaruh tidak langsung, (3) pengaruh total. Pangaruh langsung atau *direct effect* merupakan pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh sektor yang outputnya digunakan sebagai input dari produksi sektor yang bersangkutan. Sementara pengaruh tidak langsung atau *indirect effect* menunjukkan pengaruh tidak langsung yang dirasakan oleh suatu sektor yang outputnya tidak digunakan sebagai input

dari sektor yang bersangkutan. Terakhir, pengaruh total atau *total effect* adalah pengaruh secara keseluruhan dalam perekonomian di mana sektor yang bersangkutan berada.

Sebagai suatu model yang bersifat kuantitatif, I-O bisa juga memberikan gambaran menyeluruh (Daryanto & Hafizrianda,2010; Miller & Blair,1985) mengenai: Struktur perekonomian nasional atau regional yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor; Struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berskala impor; Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berskala impor; Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan permintaan akhir untuk konsumsi investasi dan ekspor. Ini berarti pemakaian model I-O mendatangkan keuntungan bagi perencanaan pembangunan daerah (Daryanto & Hafizrianda,2010): Pertama, dapat memberikan diskripsi yang detail mengenai perekonomian nasional maupun perekonomian regional dengan mengkuantifikasikan ketergantungan antarsektor dan asal dari ekspor dan impor. Kedua, untuk suatu perangkat permintaan akhir dapat ditentukan besaran output dari setiap sektor dan kebutuhannya akan faktor produksi dan sumber daya. Ketiga, dampak perubahan permintaan terhadap perekonomian baik yang disebabkan oleh swasta ataupun pemerintah dapat ditelusuri dan diramalkan secara terperinci. Keempat, perubahan-perubahan

teknologi dan harga relatif dapat diintegritaskan ke dalam model melalui perubahan koefisien teknik.

Melalui model I-O kita bisa menelusuri ke mana saja output dari suatu sektor itu didistribusikan, dan input apa saja yang digunakan oleh sektor tersebut. Dengan memodifikasi model input-output West (1997) dalam Daryanto & Hafizrianda (2010) kita bisa membentuk alur distribusi terbentuknya suatu model I-O secara sederhana khususnya. Jika dilihat dari sisi permintaan (*deman-driven*).

Matriks I-O juga digunakan untuk melihat sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi sektor pemimpin dalam pembangunan daerah. Sektor-sektor tersebut dapat dideteksi dengan empat cara (Daryanto & Hafizrianda,2010), yaitu:

1. Suatu sektor di anggap sebagai sektor kunci apabila mempunyai kaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang relatif tinggi.
2. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu menghasilkan output bruto yang relatif tinggi, sehingga mampu mempertahankan *final demand* yang relatif tinggi.
3. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.
4. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif tinggi.

B. Tinjauan Empiris

Mehboob, F. (2012), Penelitian ini didasarkan pada peranan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Pakistan. Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari tahun 1980-2010 dengan menggunakan regresi sederhana digunakan untuk mengidentifikasi hubungan signifikansi pertanian subsektor dengan GDP. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada peranan yang signifikan pada subsektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya subsektor kehutanan saja yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap GDP. Tujuan lain menunjukkan bahwa tanaman pangan dan ternak memberikan kontribusi 91 persen yang dikombinasikan dalam sektor pertanian secara agregat yang merepresentasikan kontribusi yang signifikan. Sementara itu, sektor perikanan dan kehutanan memiliki kontribusi minimal yang disebabkan oleh adanya intensitas investasi yang rendah pada sektor ini, rendahnya fasilitas, tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terampil yang terlibat.

Chebb, H., E. (2010), penelitian ini ingin melihat peran pertanian dalam pertumbuhan ekonomi dan interaksinya terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya di Tunisia. Dengan menggunakan pendekatan multivariate Johansen untuk melihat cointegrasi dari sektor perekonomian Tunisia, menyelidiki nonkausalitas antara pertanian dan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cointegritas sektor ekonomi Tunisia cenderung bergerak bersama-sama. Selain itu, eksogenitas yang lemah untuk sektor pertanian sehingga untuk sektor pertanian ditolak. Namun, dalam jangka pendek pertanian di Tunisia tampaknya memiliki peran parsial sebagai kekuatan pendorong dalam pertumbuhan sektor nonpertanian.

Sukanto, D. G.T. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul analisis peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan input-output untuk melihat keterkaitan antara input dan output serta multiplier dari sektor pertanian di Jawa Tengah pada tahun 2011. Dalam analisis penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan langsung ke depan lebih besar dari pada keterkaitan ke belakang, serta subsektor pertanian sangat terkait dengan pengganda output.

Putri, S. A. C. (2008) menganalisis peran sektor pertanian terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan input-output untuk dalam melihat keterkaitan ke belakang antarsektor, daya penyebaran dan efek pengganda sektor pertanian terhadap output, pendapatan dan tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis struktur permintaan, ekspor dan impor, struktur output dan struktur nilai tambah bruto, sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Berdasarkan analisis konsumsi rumah tangga, sektor pertanian memberikan peranan terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Sementara dari hasil analisis struktur investasi, sektor pembangunan memberikan investasi terbesar dibandingkan sektor lain. Sektor yang memberikan kontribusi terhadap koefisien penyebaran terbesar adalah sektor industri pengolahan sedangkan derajat kepekaan terbesar adalah sektor pertambangan dan galian. Pengganda output, pendapatan, dan tenaga kerja baik tipe I dan tipe II, yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor industri pengolahan. Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa sektor pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dijadikan sebagai *leading sector*.

Setyowati, N. (2012) coba menganalisis peran sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan metode deskriptif analitik yang dianalisis menggunakan *Location Quotient* (LQ). Berdasarkan analisis ini diperoleh bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Sukoharjo dimana sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan total dan surplus produksinya dapat diekspor keluar wilayah Sukoharjo. Angka pengganda sektor pertanian cenderung menurun yang mengindikasikan peran sektor pertanian dalam peluasan kesempatan kerja baik di bidang pertanian maupun di bidang lainnya semakin menurun.

Novita, D., Rahmanta, dan Mahalli, K. (2009) menganalisis dampak investasi sektor pertanian terhadap perekonomian Sumatra Utara dengan menggunakan input-output untuk melihat kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi Sumatra utara dan menentukan dampak investasi

pada peningkatan output, pendapatan dan tenaga kerja, serta determinan dampak perubahan investasi sektor pertanian dalam menghasilkan output, pendapatan dan tenaga kerja Sumatra Utara. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan struktur permintaan dan penawaran, konsumsi dan nilai tambah serta output ketika dibandingkan dengan 24 sektor lainnya. Dampak investasi sektor pertanian terhadap output sangat besar.

Mukhyi, M. A. (2007) menganalisis peranan subsektor pertanian dan sektor unggulan terhadap pembangunan kawasan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menggunakan penekatan analisis yaitu, *Location Quotieon* (LQ), *Input-output* (IO), dan *Interregional Input-Output* (IRIO). Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini ditemukan bahwa tingkat margin sektor di Provinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Sektor yang mempunyai nilai pengganda terbesar terhadap perekonomian secara nasional sesuai dengan sektor unggulan yaitu, subsektor peternakan, subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau, subsektor industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, subsektor industri kertas dan barang dari cetakan, subsektor industri barang dari logam, subsektor industri lainnya, sektor listrik, gas dan air bersih, subsektor bangunan; subsektor hotel

dan restoran; subsektor angkutan darat, subsektor angkutan air dan subsektor angkutan darat.

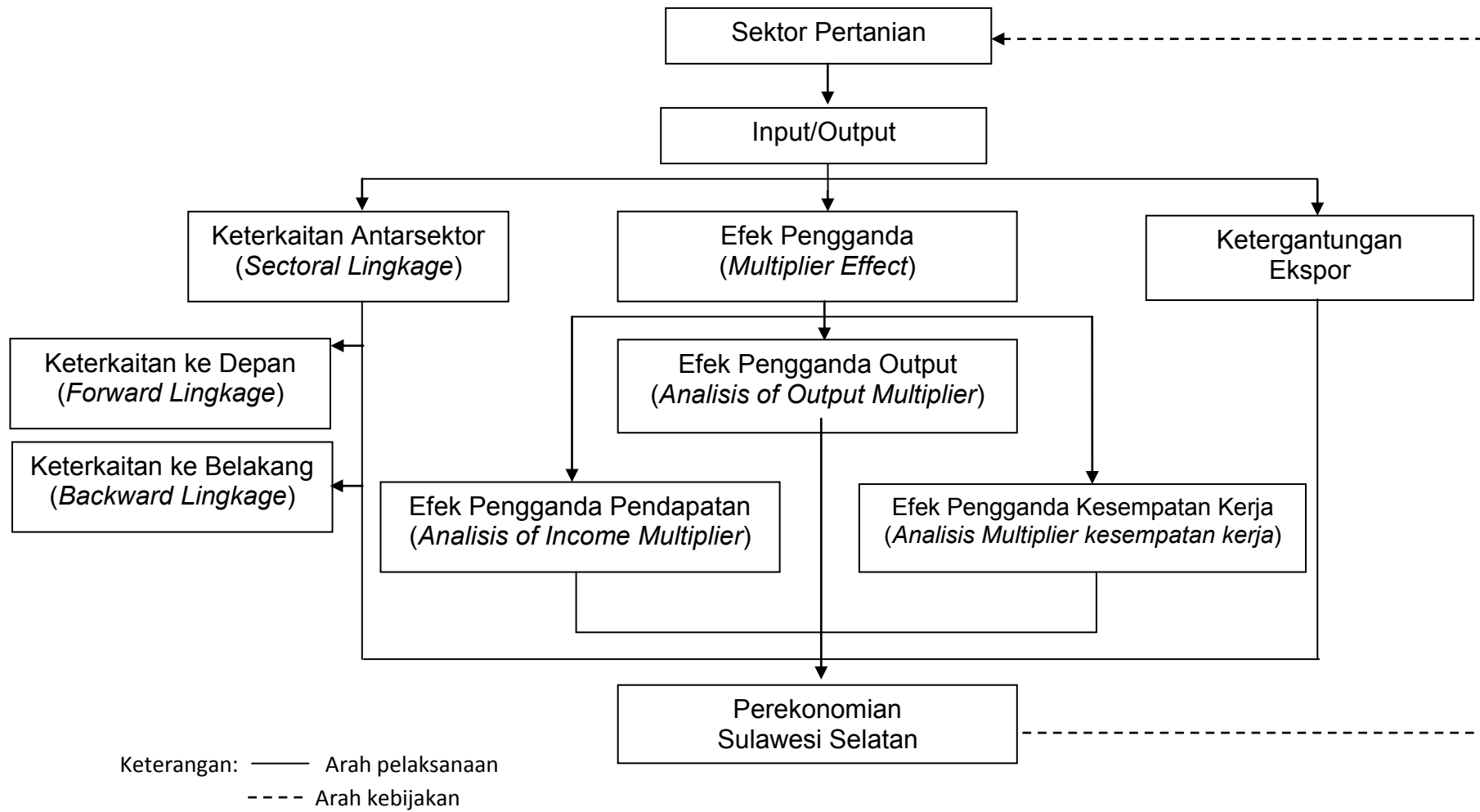
C. Kerangka Konsep

Dalam perekonomian suatu negara, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu perekonomian yang diukur dari akumulasi besarnya indeks pertumbuhan output yang dihasilkan dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Besarnya output yang dihasilkan masing-masing sektor tersebut di tiap negara sangat bervariasi, tergantung pada pendekatan pembangunan yang digunakan. Setiap aktivitas ekonomi pada suatu sektor memberikan kontribusi terhadap sektor yang lain, sehingga adanya kebijakan ekonomi terhadap suatu sektor akan berdampak terhadap sektor-sektor yang lain.

Pada dasarnya, aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang termasuk sektor primer, memiliki keterkaitan pada sektor-sektor perekonomian lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sektor ini memberikan efek pengganda terhadap output, kesempatan kerja dan pendapatan. Namun sektor ini tidak lagi menjadi sektor kunci dalam perekonomian.

Aktivitas perekonomian di Sulawesi Selatan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di daerah tersebut. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan sebuah perencanaan pembangunan daerah yang bertahap dan

berkesinambungan melalui sebuah perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, pemerintah Sulawesi Selatan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas kebijakan tersebut, dianalisis dengan menggunakan model input-output untuk melihat keterkaitan ke depan dan ke belakang antarsektor. Dalam analisis ini dapat dilihat apakah sektor pertanian merupakan sektor kunci (*leading sector*) serta mengukur besarnya efek pengganda terhadap output, tenaga kerja dan pendapatan. Untuk lebih sederhananya dapat digambarkan dalam kerangka konsep sebagaimana terlihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka konsep

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan.
2. Diduga bahwa sektor pertanian memiliki efek pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda kesempatan kerja yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan.
3. Diduga bahwa sektor pertanian memiliki ketergantungan ekspor yang relatif tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya di Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survei literatur, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari publikasi maupun dokumentasi beberapa instansi di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Sulawesi Selatan, literatur dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpul merupakan data sekunder (*cross section*) yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik Provinsi Sulawesi Selatan di antaranya berupa data input output Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 atas dasar harga pembeli beserta beberapa data pendukung yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

C. Metode Analisis data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kuantitatif dengan analisis input output 9 sektor

ekonomi. Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka akan digunakan beberapa metode yang lebih spesifik lagi untuk menyelesaikannya dengan bantuan komputerisasi, yaitu program Microsoft Excel dan program *I-O Analysis For Practitioners* (IOAP) versi 1.0.1.

C. 1. Koefisien Input

Untuk memperoleh nilai koefisien input, misalkan nilai arus barang dari sektor i ke sektor j kita notasikan z_{ij} , kemudian total output dari sektor i dinotasikan X_i , sedangkan total permintaan akhir dari sektor i adalah Y_i , maka dapat kita tuliskan total output dari sektor i sebagai berikut.

$$X_i = z_{i1} + z_{i2} + z_{i3} + \dots z_{in} + Y_i \dots\dots\dots (3.1)$$

Oleh karena dalam perekonomian terdapat n sektor produksi, maka secara keseluruhan kita bisa tuliskan total output semua sektor adalah:

$$\begin{aligned} X_1 &= z_{11} + z_{12} + z_{13} + \dots z_{1n} + Y_1 \\ X_2 &= z_{21} + z_{22} + z_{23} + \dots z_{2n} + Y_2 \\ &\dots \\ X_i &= z_{i1} + z_{i2} + z_{i3} + \dots z_{in} + Y_i \\ &\dots \\ X_n &= z_{n1} + z_{n2} + z_{n3} + \dots z_{nn} + Y_n \dots\dots\dots (3.2) \end{aligned}$$

Dalam bentuk umum persamaan (3.2)

$$\sum Z_{ij} + Y_i = X_i \quad \text{untuk } i = 1,2,3 \dots \dots \dots (3.3)$$

Dari persamaan (3.3) kita dapat mengintroduksi suatu koefisien input teknik a_{ij} dengan rumus:

$$a_{ij} = \frac{z_{ij}}{X_j} \dots \dots \dots (3.4)$$

Koefisien ini dapat diterjemahkan sebagai jumlah input sektor i yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit output sektor j . Untuk jumlah sektor sebanyak n , seluruh koefisien input a_{ij} dapat dinyatakan dalam sebuah matriks A sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ a_{n1} & a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \dots \dots \dots (3.5)$$

Matriks A sering disebut sebagai matrik input atau matriks teknologi. Selanjutnya, karena persamaan bisa diubah menjadi : $z_{ij} = a_{ij} X_j$, serta

dengan ketentuan bahwa $X_j = X_i$, maka persamaan (3.2) dapat ditulis kembali dalam sistem persamaan berikut ini.

$$\begin{aligned}
 X_1 &= a_{11} X_1 + a_{12} X_2 + a_{13} X_3 + \dots + a_{1n} X_n + Y_1 \\
 X_2 &= a_{21} X_1 + a_{22} X_2 + a_{23} X_3 + \dots + a_{2n} X_n + Y_2 \\
 &\vdots \\
 X_n &= a_{n1} X_1 + a_{n2} X_2 + a_{n3} X_3 + \dots + a_{nn} X_n + Y_n \dots \dots \dots (3.6)
 \end{aligned}$$

Kemudian, jika sisi kanan dalam persamaan (3.6) semuanya dipindahkan ke kiri, kecuali Y, diperoleh sebah sistem persamaan:

$$\begin{aligned}
 X_1 - a_{11} X_1 - a_{12} X_2 - a_{13} X_3 - \dots - a_{1n} X_n &= Y_1 \\
 X_2 - a_{21} X_1 - a_{22} X_2 - a_{23} X_3 - \dots - a_{2n} X_n &= Y_2 \\
 &\vdots \\
 X_n - a_{n1} X_1 - a_{n2} X_2 - a_{n3} X_3 - \dots - a_{nn} X_n &= Y_n \dots \dots \dots (3.7)
 \end{aligned}$$

Atau disederhanakan menjadi:

$$\begin{aligned}
 (1-a_{11}) X_1 - a_{12} X_2 - a_{13} X_3 - \dots - a_{1n} X_n &= Y_1 \\
 X_2 - a_{21} X_1 - (1-a_{22}) X_2 - a_{23} X_3 - \dots - a_{2n} X_n &= Y_2 \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

$$X_n - a_{n1} X_1 - a_{n2} X_2 - (1-a_{n3}) X_3 - \dots - a_{nn} X_n = Y_n \dots\dots\dots (3.8)$$

Sistem persamaan (3.8) dapat dituliskan dalam notasi matriks yang lebih sederhana lagi sebagai berikut.

$$(I-A) X = Y \dots\dots\dots (3.9)$$

Yang mana I adalah matriks identitas berukuran n x n, A merupakan matriks koefisien. Sedangkan X dan Y masing masing menunjukkan vector kolom matriks output dan permintaan akhir. Persamaan matriks (3.9) dapat kita ubah bentuknya menjadi:

$$X = (I-A)^{-1} Y$$

$$X = M_a Y \dots\dots\dots (3.10)$$

Dimana M_a adalah matriks $(I-A)^{-1}$ yang dikenal dengan nama matriks invers Leontief. Kekuatan peramalan model input output adalah terletak pada invers matriks Leontief ini.

C. 2. Indeks Keterkaitan Antarsektor

Matriks I-O kita gunakan untuk melihat sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi sektor pemimpin dalam pembangunan daerah. Sektor-sektor

tersebut dapat dideteksi dengan empat cara (Daryanto & Hafizrianda,2010), yaitu:

1. Suatu sektor di anggap sebagai sektor kunci apabila mempunyai kaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang relatif tinggi.
2. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu menghasilkan output bruto yang relatif tinggi, sehingga mampu mempertahankan *final demand* yang relatif tinggi.
3. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.
4. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif tinggi.

Untuk menentukan sektor kunci melalui cara pertama di atas, penelitian ini menggunakan dua metode pengukuran (Daryanto & Hafizrianda, 2010), yaitu metode Chenery-Watanabe (1958) dan metode Rasmussen (1956). Pada metode Chenery-Watanabe, keterkaitan antarsektor dibagi dalam dua bagian yaitu keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Ukuran keterkaitan ke belakang pada suatu sektor beranjak dari model Leontief dengan melihat sisi permintaan, sedangkan untuk keterkaitan ke depan dilihat dari sisi penawaran.

$$BL_j^c = \sum_{i=1}^n a_{ij} \dots\dots\dots (3.11)$$

Dimana BL^c_j menunjukkan keterkaitan ke belakang dari sektor j dengan metode Chenery_Watanabe, x_{ij} , adalah banyaknya input yang berasal dari sektor i yang digunakan untuk memproduksi output sektor j, dan a_{ij} adalah koefisien input dari sektor j ke sektor i. Melalui cara yang sama, namun penjumlahan sekarang dilakukan secara baris, ukuran keterkaitan ke depan dapat dihitung dengan rumus:

$$FL^c_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \dots\dots\dots (3.12)$$

Dimana FL^c_i merupakan keterkaitan ke depan dari sektor i. Oleh karena itu, metode ini menggunakan koefisien input secara langsung, yang didapat dari satu kali inters perhitungan keterkaitan antarsektor. Maka ukuran yang diperoleh dari metode ini sering disebut sebagai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan secara langsung.

Untuk mengukur keterkaitan secara langsung dan tidak langsung, menggunakan metode Rasmussen yang menunjukkan penjumlahan kolom (atau baris) pada matriks inverst Leontief, $(I-A)^{-1}$, dipakai sebagai ukuran keterkaitan antar sektor. Sehingga keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan menurut metode ini masing-masing diukur dengan cara:

$$BL^R_j = \sum_{i=1}^n g_{ij} \dots\dots\dots (3.13)$$

$$FL^R_i = \sum_{j=1}^n g_{ij} \dots\dots\dots (3.14)$$

Dimana BL^R_j dan FL^R_j masing masing menunjukkan ukuran keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan untuk metode Rasmussen, sedangkan g_{ij} adalah elemen pada matriks invers Leontief $G = (I-A)^{-1}$. Oleh karena metode Rasmussen menggunakan matriks invers Leontief, maka ukuran keterkaitan antarsektor yang diperoleh bisa dikatakan merupakan ukuran keterkaitan langsung dan tidak langsung, yang menghitung dampak total dari suatu sektor dalam perekonomian.

C. 3. Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan

Untuk mengukur indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan dengan koefisien variarasi penelitian ini menggunakan metode Rasmussen yang dapat diukur dengan menggunakan persamaan berikut (Daryanto & Hafizrianda,2010) :

$$\alpha_j = \frac{\sum_{i=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j g_{ij}} \dots\dots\dots (3.15)$$

$$\beta_i = \frac{\sum_{i=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j g_{ij}} \dots\dots\dots (3.16)$$

Dimana α_j menunjukkan indeks daya penyebaran dari sektor j dalam perekonomian, dan β_i merupakan indeks derajat kepekaan dari sektor i . Sedangkan g_{ij} adalah elemen matriks invers leontief, $G = (I-A)^{-1}$.

Daya penyebaran dan derajat kepekaan merupakan perbandingan dampak, baik ke belakang maupun ke depan, terhadap rata-rata seluruh dampak sektor, sehingga nilai ini masing masing sering disebut sebagai *backward linkage effect ratio* dan *forward linkage effect ratio*. Jika nilai nilai indeks daya penyebaran sektor j lebih besar dari satu, $V_j > 1$, ini tandanya secara relatif permintaan akhir sektor j dalam merangsang pertumbuhan produksi lebih besar dari rata rata, sehingga sektor ini merupakan sektor yang strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Begitu pula untuk sektor i yang mempunyai indeks derajat penyebaran lebih besar dari satu, $V_i > 1$, dapat digolongkan sebagai sektor strategis, karena secara relatif ia dapat memenuhi permintaan akhir sebanyak di atas kemampuan rata rata dari sektor lainnya (Daryanto & Hafizrianda, 2010).

C. 4. Indeks Angka Pengganda (*Multiplier Effect*)

Tiga variabel yang selalu menjadi perhatian utama dalam analisis angka pengganda adalah output sektor sektor produksi, pendapatan rumah tangga, dan lapangan kerja. Oleh karena itu, dikenal adanya angka pengganda output, angka pengganda pendapatan rumah tangga, dan

angka pengganda lapangan pekerjaan. Angka pengganda output itu sebenarnya menunjukkan nilai total dari output yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi adanya perubahan satu unit permintaan akhir di suatu sektor. Dengan demikian cara pengukurannya (Daryanto & Hafizrianda,2010), yaitu:

$$O_j = \sum g_{ij} \dots\dots\dots(3.17)$$

Dimana O_j menunjukkan besarnya angka pengganda output dari sektor j , sedangkan g_{ij} , elemen matriks pada matriks invers Leontief, $G = (I-A)^{-1}$.

Katakanlah Q itu menunjukkan jumlah dari seluruh elemen pada matriks invers Leontief, yang ditentukan dengan rumus:

$$Q = \sum \sum g_{ij} \dots\dots\dots (3.18)$$

Untuk mengukur pengganda pendapatan menggunakan dua tipe angka pendapatan rumah tangga, yaitu angka pengganda pendapatan tipe I yang didapat dari model IO terbuka, dan angka pengganda pendapatan tipe II yang dihitung berdasarkan model IO tertutup. Masing-masing angka pengganda pendapatan ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_j = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \cdot g_{ij}}{P_i} \dots\dots\dots (3.19)$$

$$\bar{Y}_j = \frac{\sum_{i=1}^n P_i \cdot \bar{g}_{ij}}{P_i} \dots\dots\dots (3.20)$$

Dimana Y_j adalah angka pengganda pendapatan tipe I pada sektor j , \bar{Y}_j adalah angka pengganda pendapatan tipe II, P_i adalah koefisien input upah/gaji rumah tangga pada sektor i , g_{ij} adalah unsur matriks Leontief untuk model IO terbuka dan \bar{g}_{ij} adalah unsur matriks invers Leontief untuk model IO tertutup.

Selanjutnya, untuk menentukan jumlah pekerja yang diperlukan oleh satu unit permintaan akhir (*final demand*) yang terkait dengan output suatu sektor dalam perekonomian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$L_i = L_i^* (I - A)^{-1} Y \dots\dots\dots (3.21)$$

Dimana L_i^* merupakan matriks koefisien tenaga kerja yang diturunkan dengan cara:

$$L_i^* = \begin{pmatrix} \gamma_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_1 & 0 & 0 \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ 0 & 0 & 0 & \gamma_1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (3.22)$$

Dimana L_i adalah pengganda kesempatan kerja, L_i^* adalah matriks koefisien tenaga kerja, I adalah matriks identity, A adalah matriks koefisien input, Y adalah permintaan akhir.

C. 5. Analisis Ketergantungan Ekspor

Formulasi angka ketergantungan ekspor, multiplier output untuk ekspor dan multiplier tenaga kerja untuk ekspor dilakukan dengan mengikuti metodologi Kaneko. Derajat ketergantungan ekspor menunjukkan proporsi produksi suatu sektor yang secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Dengan kata lain, indicator ini menunjukkan keterkaitan suatu sektor dengan aktivitas ekspor. Semakin tinggi derajat ketergantungan ekspor suatu sektor berarti semakin besar ketergantungan ekspor terhadap sektor tersebut (Kuncoro,2001). Derajat ketergantungan ekspor suatu sektor diperoleh dengan mengalikan invers koefisien matriks model leontief setelah modifikasi dengan koefisien impor dengan vektor kolom ekspor dan kemudian membaginya dengan total produk dari berbagai sektor perekonomian ketergantungan ekspor suatu diformulasikan sebagai berikut:

$$dk_i = \frac{\sum g_{ij} E_j}{X_i} \dots\dots\dots (3.23)$$

Dimana dk_i adalah derajat ketergantungan ekspor sektor i ; E adalah ekspor sektor j ; x_i adalah total output sektor i ; g_{ij} adalah elemen invers matriks model leontief.

Dalam mengimplikasikan model I-O matriks invers yang digunakan ialah matriks invers setelah memperhitungkan impor, sehingga persamaan keseimbangan umumnya yang digunakan dalam model I-O yang lebih tepat menjadi:

$$X = (I - A + M^*)^{-1} Y \dots\dots\dots (3.24)$$

Dimana M^* adalah matriks koefisien impor yang digunakan dengan persamaan:

$$M^* = \frac{M_i}{\sum a_{ij} X_j + Y_i} \dots\dots\dots (3.25)$$

Dampak pengganda ekspor akan berkaitan dengan output yang dihasilkan oleh suatu sektor dan daya penyerapan tenaga kerja oleh sektor tersebut. Hal ini diakomodasikan dengan menggunakan dua alat analisis yaitu pengganda ekspor untuk output dan pengganda ekspor untuk penyerapan tenaga kerja. Indeks pengganda ekspor terhadap output (po_i) dinyatakan dalam formulasi sebagai berikut.

$$PO_i = \frac{\sum b_{ij} E_j}{\sum E_j} \dots\dots\dots (3.26)$$

Indeks pengganda ekspor terhadap daya serap tenaga kerja oleh suatu sektor (PI_i) dinyatakan sebagai berikut:

$$PI_i = \frac{l_i \sum b_{ij} E_j}{\sum E_j} \dots\dots\dots (3.27)$$

Dimana l_i adalah koefisien tenaga kerja sektor i ; pl_i adalah angka pengganda ekspor terhadap tenaga kerja.

D. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan analisis maka dalam penelitian ini diberikan batasan dan definisi operasional serta indikator variabel sebagai berikut:

- a. Sektor pertanian adalah sektor yang memproduksi barang dan jasa pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan.
- b. Output adalah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi pada tahun 2009 di Sulawesi Selatan (jutaan Rupiah).
- c. Input antara adalah nilai dari output sektor-sektor produksi yang digunakan sebagai input dalam proses produksi oleh sektor-sektor produksi pada tahun 2009 di Sulawesi Selatan (jutaan rupiah).

- d. Input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi dalam suatu kegiatan ekonomi, yang terdiri dari upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung neto, pada tahun 2009 di Sulawesi Selatan (jutaan rupiah).
- e. Permintaan akhir adalah permintaan atas barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir seperti pengeluaran rumah tangga, pemerintah, swasta, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor, tahun 2009 di Sulawesi Selatan (jutaan rupiah).
- f. Pendapatan adalah besarnya perubahan upah/gaji yang diterima oleh sektor rumah tangga Sulawesi Selatan akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir di sektor rumah tangga dengan menggunakan pengganda pendapatan (rupiah).
- g. Kesempatan kerja adalah besarnya perubahan jumlah kesempatan kerja yang tersedia akibat adanya perubahan satu unit permintaan akhir di sektor rumah tangga (orang).
- h. Keterkaitan ke belakang adalah besarnya input yang dibutuhkan dari sektor i (pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa) untuk menghasilkan output pada sektor j (pertanian, pertambangan dan penggalian,

industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009.

- i. Keterkaitan ke depan adalah besarnya output yang dibutuhkan oleh sektor i untuk memenuhi kebutuhan input sektor formal di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009.
- j. Pengganda output adalah besarnya tambahan output yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 akibat adanya kenaikan permintaan akhir sebanyak Rp 1.
- k. Pengganda pendapatan adalah besarnya tambahan pendapatan (upah/gaji) pada sektor j di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 akibat adanya kenaikan permintaan akhir sebanyak Rp 1.
- l. Pengganda kesempatan kerja adalah besarnya tambahan kesempatan kerja pada sektor i di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 akibat adanya kenaikan permintaan akhir sebanyak Rp 1.
- m. Ketergantungan ekspor adalah besarnya output sektor i yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor Provinsi Sulawesi Selatan, baik antarprovinsi maupun luar negeri, di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009.

- n. Ketergantungan tipe I adalah besarnya penambahan output, pendapatan atau kesempatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 jika pola konsumsi rumah tangga tidak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009.
- o. Ketergantungan tipe II adalah besarnya penambahan output, pendapatan atau kesempatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 jika pola konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geomorfologis

1. Letak Geografis, Topografi, dan Geologi

Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak antara $0^{\circ}12'-8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'-122^{\circ}36'$ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih $45.519,24 \text{ km}^2$, dimana sebagian besar wilayahnya berada di jazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian lainnya berada pada jazirah tenggara Pulau Sulawesi.

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter dari permukaan laut (DPL), dan sebagian merupakan dataran yang

berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Terdapat sekitar 65 sungai yang mengalir di provinsi ini. Lima danau besar menjadi rona spesifik wilayah ini, tiga di antaranya yaitu danau Matana, danau Towuti dan danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, serta dua danau lainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di kabupaten Wajo.

Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis batuan-batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cendrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai pegunungan Molegraf, Pegunungan Perobengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan Volkan Kwarter, formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tanah Toraja) dan di Gunung Lompobattang (Gowa).

Kapur kerang terdapat di sebelah barat memanjang antara Enrekang sampai Rantepao, utara Parepare, di Pegunungan Bone Utara sebelah barat Watampone. Bagaian barat Pulau Selayar, dan di Tanjung Bira (Bulukumba). Untuk jenis Batuan Plutonik Basa, dijumpai di bagaian timur Malili dan tersebar sebagai intrusi antara lain di bagaian utara Palopo, di gunung Maliowo dan Gunung Karambon. Batuan Plutonik

Masam, ditemukan di sekitar Sungai Mamasa, sedangkan granodiorit dijumpai di darat laut Sasak. Di antara Masamba dan Leboni. Batuan Sediment Paleogen, tersebar di bagaian utara Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dibagian timur Pangkajene sampai Sungai Sumpatu. Batuan sedimen neogen, penyebarannya di sekitar Lodong, sebelah timur Masamba memanjang dari utara Enrekang sampai Pompanua, dari Sengkang ke tenggara sampai Rarek dan ke selatan sampai Sinjai, di Pulau Selayar bagian timur dan di selatan Sinjai sampai Kajang.

2. Hidrologi dan Klimatologi

Pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 65 sungai mengalir berbagai kabupaten khususnya yang berada di dataran tinggi. Di wilayah Luwu terdapat 25 aliran sungai. Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan Pinrang di aliri oleh sungai terpanjang yakni Sungai Saddang dengan panjang 150 km. Daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang meliputi wilayah 8 kabupaten di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar mengalir Sungai Jeneberang. Danau Tempe dan Sidenreng terdapat di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, sementara di wilayah Luwu terdapat Danau Matana dan Towuti. Pada wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan, formasi Walanae merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan dengan debit kecil sampai sedang. Air panas dijumpai pada endapan alluvial dan

endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba.

Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dimana musim hujan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Pada bulan November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebut sering terjadi musim hujan.

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim yaitu tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe iklim B termasuk iklim basah dimana curah hujan rata-rata 3000-3500 mm/tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, tipe B meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo, Luwu, dan Tana Toraja. Tipe Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Barru, Maros Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar. Tipe iklim D dengan curah hujan rata-rata 2000-2500 mm/tahun. Tipe iklim

ini terbagi 3 yaitu wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tanah Toraja, dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe D2 terdiri dari Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkajene, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan curah hujan rata-rata antara 1500-2000 mm/tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone, dan Enrekang. Tipe iklim E2 terdapat di Kabupaten Maros, Bantaeng dan Selayar.

3. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45.751,91 km², penggunaan lahan dalam jumlah yang terbesar adalah hutan negara yang luasnya mencapai 28,45 persen dari total wilayah atau mencapai 13.014,56 km², kemudian lahan sawah yang secara keseluruhan luasnya mencapai 5.983,89 km² atau 13,08 persen dari total luas lahan yang ada. Penggunaan lahan lainnya yang cukup signifikan adalah kebun atau tegalan yang luasnya mencapai 12,10 persen dari luas wilayah keseluruhan yaitu 5.534,24 km². Penggunaan lahan terendah adalah kolam atau empang yang hanya sebesar 145,97 km² atau 0,32 persen dan rawa seluas 194,12 km² atau seluas 0,42 persen.

Penggunaan lahan sebagai hutan terluas terdapat di Kabupaten Luwu Utara yang mencapai 3.732,79 km² atau 28,68 persen dari total luas hutan negara yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain Kabupaten Luwu Utara, daerah yang memiliki hutan negara yang relatif luas adalah Kabupaten Luwu Timur 2.311,25 km² atau 17,75 persen dari total luas hutan negara dan kabupaten Bone yang memiliki hutan seluas 1.489,71 km² dari total luas hutan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat dua kabupaten/kota yang tidak memiliki hutan negara yaitu Kota Makassar Dan Kabupaten Takalar.

Penggunaan lahan sawah terbesar terdapat di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Luas lahan sawah di Kabupaten Bone mencapai 983,46 km² atau 16,44 persen dari total luas lahan di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan luas lahan sawah di Kabupaten Wajo mencapai 861,42 km² atau 14,40 persen. Dari keseluruhan luas sawah ke dua kabupaten tersebut, sebagian besar berupa sawah tadah hujan yang luasnya mencapai 641,95 km² di Kabupaten Bone dan 657,80 km² di Kabupaten Wajo. Penggunaan lahan sebagai sawah yang menggunakan irigasi teknis terbesar terdapat di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Penggunaan sawah irigasi mencapai 375,75 km² di Kabupaten Pinrang dan 298,90 km² di Kabupaten Sidrap. Penggunaan lahan sawah terendah terdapat di Kota Parepare yang lahan sawahnya hanya mencapai 9,33 km². Selain itu, daerah yang memiliki lahan sawah yang relatif kecil adalah Kabupaten Selayar, Kota Palopo, dan Kota Makassar.

Luas areal persawahan ke tiga wilayah tersebut masing-masing 26,18 km² di Kabupaten Selayar 29,84 km² di Kota Palopo, dan 30,33 km² di Kota Makassar.

4. Kependudukan dan ketenagakerjaan

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 adalah sebesar 7.865.113 jiwa, kemudian berkembang menjadi 8.115.717 jiwa pada tahun 2011 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,05 persen per tahun. Jumlah penduduk terbesar pada tahun 2011 terdapat di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.352.136 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,34 persen per tahun, sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Selayar sebesar 123.283 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,13 persen pertahun. Kabupaten/kota yang menjadi pusat-pusat kegiatan wilayah seperti Parepare, Barru, Pangkajene, Palopo, Bulukumba, dan Bone (Watampone) memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kota Makassar.

a. Kepadatan dan distribusi penduduk

Distribusi penduduk sebagian besar masih terkonsentrasi di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas penduduk pada tahun 2011 terkonsentrasi di Kota Makassar dengan Proporsi penduduk sebesar 16,66 persen. Konsentrasi penduduk yang relatif tinggi juga

terdapat di kabupaten Bone dengan proporsi penduduk sebesar 8,93 persen. Distribusi penduduk yang terendah terdapat di Kabupaten Selayar yang letaknya berada di luar Pulau Sulawesi dengan proporsi sebesar 1,52 persen.

Tabel 4.1 Kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Distribusi penduduk (%)
1	Kep. Selayar	123.283	903,50	13.645	1.52
2	Bulukumba	398531	1.154,67	34.515	4.91
3	Bantaeng	178.477	395,83	45.089	2.20
4	Jeneponto	346149	749,79	38.318	4.27
5	Takalar	272.316	566,51	48.069	3.36
6	Gowa	659.512	1.883,32	35.019	8.13
7	Sinjai	231.182	819,96	28.194	2.85
8	Maros	322.212	1.619,12	19.900	3.97
9	Pangkep	308.814	1.112,29	27.764	3.81
10	Barru	167.653	1.174,71	14.272	2.07
11	Bone	724.905	4.559,00	15.901	8.93
12	Soppeng	226.079	1.359,44	16.630	2.79
13	Wajo	388.985	2.506,20	15.521	4.79
14	Sidrap	274.648	1.883,25	14.584	3.38
15	Pinrang	354.652	1.961,77	18.084	4.37
16	Enrekang	192.163	1.786,01	10.759	2.37
17	Luwu	335.828	3.000,25	11.193	4.14
18	Tana Toraja	223.306	2.054,30	10.870	2.75
19	Luwu Utara	290.365	7.502,68	3.870	3.58
20	Luwu Timur	245.515	6.944,88	3.535	3.03
21	Toraja Utara	218.943	1.151,47	19.014	2.70
22	Makassar	1.352.136	175,77	769.264	16.66
23	Pare-Pare	130.563	99,33	131.444	1.61
24	Palopo	149.421	247,52	60.367	1.84
2011		8.115.717	45.764,53	176	
2010		8.034.776	45.764,53	176	100
2009		7.908.519	45.764,53	176	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah 178 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kabupaten/kota. Kepadatan penduduk

penduduk di provinsi ini masih belum merata. Kota Makassar yang memiliki luas wilayah sebesar 175,77 km² dihuni oleh 1.352.136 jiwa penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kota Makassar berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk Kota Makassar pada tahun 2011 mencapai 769,3 ribu jiwa/km², sedangkan daerah yang memiliki kepadatan penduduk sangat rendah adalah Kabupaten Luwu Timur yaitu 3,5 ribu jiwa/km². Angka tersebut berada jauh di bawah kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

b. Komposisi penduduk

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Struktur umur penduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktivitas penduduk di daerah tersebut karena hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk usai produktif di suatu daerah. Penduduk usai produktif artinya penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak bergantung kepada orang lain. Kelompok usia produktif meliputi usai 15-64 tahun.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	410.874	387.991	798.865
4-9	446.642	420.344	866.986
10-14	432.289	409.325	841.614
15-19	373.044	372.376	745.420
20-24	331.373	353.901	685.274
25-29	322.053	348.779	670.832
30-34	300.582	325.566	626.148
35-39	294.879	311.910	606.789
40-44	256.615	277.447	534.062
45-49	204.208	228.189	432.397
50-54	170.054	189.148	359.202
55-59	130.227	141.209	271.436
60-64	103.143	127.614	230.757
65+	187.944	257.912	445.856
2011	3.963.927	4.151.711	8.115.638
2010	3.924.431	4.110.345	8.034.776

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012

Berdasarkan Tabel 4.2 Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 berada dalam kelompok umur 4-9 tahun yaitu 866,9 ribu jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah terkecil adalah kelompok penduduk usai 60 -64 tahun yaitu sebesar 230,7 ribu jiwa. Sekitar 63,61 persen penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan berada di usai produktif.

c. Ketenagakerjaan

Data statistik tenaga kerja tahun 2012 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja sebanyak 3.612.424 orang dan bekerja sebanyak 3.375.498 orang, sementara masih terdapat pengangguran murni 236.926 orang atau sebesar 6,56 persen, yang mengalami penurunan sebesar 1.81 persen jika dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 298.952 orang atau sebesar 8,37 persen.

Tabel 4.3 Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan kerja utama di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2012

No	Lapangan usaha	Jumlah					Rata-rata %
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Pertanian	1.613.949	1.588.626	1.620.177	1.469.245	1.475.783	-0.02
2	Pertambangan dan penggalian	18.230	17.509	29.315	29.035	25.753	0.13
3	Industri pengelolaan	183.430	214.668	200.446	223.246	225.880	0.06
4	Listrik, gas & air bersih	7.473	8.845	8.100	7.831	14.256	0.22
5	Bangunan	148.467	168.301	178.220	178.717	181.433	0.05
6	Perdagangan, hotel & restoran	578.961	636.714	621.764	654.516	614.082	0.02
7	Angkutan & komunikasi	194.483	187.010	172.957	181.214	181.602	-0.02
8	keuangan, Persewaan/jasa perus	38.545	38.123	39.436	55.828	58.143	0.12
9	Jasa-jasa	352.573	362.460	406.108	575.863	574.976	0.14
Jumlah		3.136.111	3.222.256	3.276.523	3.375.498	3.351.908	0.02

Sumber: BPS, 2008,2009,2010,2011 & 2012

Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 44,03 persen dari jumlah penduduk yang berumur di atas 15 tahun. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan penduduk terhadap sektor tersebut masih sangat tinggi. Sebagian besar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Hanya penduduk Kota Makassar dan Kota Parepare sebagian besar penduduknya bekerja di sektor nonpertanian yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran.

B. Perekonomian Wilayah

Pada sektor perekonomian wilayah, lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri di bidang ini menunjukkan kecenderungan bertumbuh dengan laju yang cukup tinggi, walaupun dari sisi identitas umumnya mirip satu dengan lainnya. Kebanyakan lembaga dimaksud menyanggah identitas sebagai lembaga ekonomi modern yang memposisikan keuntungan sebagai orientasi utama dengan seperangkat aturan dan nilai yang cenderung serupa pula. Keberadaan lembaga ini bukannya menambah kualitas keberagaman tetapi justru sebaliknya, karena memarginalkan lembaga tradisional. Kehadiran lembaga ekonomi modern dalam bentuk bank dan koperasi telah menggeser lembaga tradisional. Demikian pula kehadiran lembaga pasar modern cenderung meminggirkan eksistensi pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang mestinya menambah keragaman, justru melemahkan entitas yang sudah ada. Kehadiran perusahaan besar sebagai lembaga ekonomi yang lebih terkonsentrasi pada bidang otomotif dan konstruksi, kurang mendorong produksi manufaktur dan agroindustri, juga menjadi fenomena di balik rendahnya keragaman dalam kelembagaan ekonomi. Lembaga ekonomi dalam perdagangan komoditas utama seperti kakao, beras dan rumput laut, belum bergeser dari sekedar pedagang pengumpul ke arah penciptaan nilai tambah melalui industri pengelolaan.

1. Struktur Ekonomi

Produk domestik regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. sementara itu, potensi ekonomi pada suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB. Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri dari Sembilan sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan galian, industri dan pengelolaan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa.

Tabel 4.4 Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2011

Lapangan usaha (1)	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milyar rupiah)				Distribusi (%)			
	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2008 (7)	2009 (8)	2010 (9)	2011 (10)
1 Pertanian	12.923,42	13.528,69	13.844,69	14.737,35	29,01	28,59	27,04	26,74
2 Pertambangan dan penggalian	4.034,94	3.852,79	4.459,32	4.170,85	9,06	8,14	8,71	7,57
3 Industri pengolahan	6.241,44	6.468,79	6.869,43	7.394,45	14,01	13,67	13,42	13,42
4 Listrik, gas, dan air bersih	451,00	490,45	529,82	575,41	1,01	1,04	1,03	1,04
5 Konstruksi	2.328,42	2.656,77	2.900,27	3.250,82	5,23	5,61	5,66	5,90
6 Perdagangan, hotel, dan restoran	7.034,56	7.792,10	8.698,81	9.631,86	15,79	16,46	16,99	17,48
7 Pengangkutan dan komunikasi	3.651,37	4.023,68	4.619,93	5.179,27	8,20	8,50	9,02	9,40
8 Keuangan, perumahan dan jasa perusahaan	2.881,07	3.203,98	3.742,09	4.297,33	6,47	6,77	7,31	7,80
9 Jasa jasa	5.003,60	5.308,83	5.535,55	5.879,58	11,23	11,22	10,81	10,67
PDB	44.549,82	47.326,08	51.199,90	55.116,92	100	100	100	100

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, PDRB Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sekitar Rp 55.116,92 miliar dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 26,74 persen dan disusul oleh sektor perdagangan, perhotelan dan restoran yaitu sebesar 17,48 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya besarnya kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, dan sebaliknya, sektor perdagangan, perhotelan dan restoran memberikan kontribusi yang semakin besar.

Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan struktural dan pergeseran sektoral. Komponen utama dari perubahan struktur ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke nonpertanian. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2008 tidak mengalami banyak perubahan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan penduduknya. Tingkat pertumbuhan ini ditentukan oleh pertumbuhan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika mempunyai kemampuan

untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produksi barang dan jasa yang sifatnya jangka panjang. Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Tabel 4.5 Persentase pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2011

Lapangan usaha	Atas Dasar Harga Berlaku				Atas Dasar Harga konstan 2000			
	2009	2010	2011	Rata-rata	2009	2010	2011	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Pertanian	11,71	8,69	14,28	11,56	4,68	2,34	6,45	4,49
2 Pertambangan dan penggalan	-11,25	29,36	17,22	11,78	-4,51	15,74	-6,47	1,59
3 Industri pengolahan	13,15	15,52	16,13	14,43	3,64	6,19	7,64	5,83
4 Listrik, gas, dan air bersih	13,26	14,61	14,52	14,13	8,75	8,03	8,60	8,46
5 Konstruksi	26,67	21,28	18,77	22,24	14,10	9,17	12,09	11,78
6 Perdagangan, hotel, dan restoran	19,95	22,44	18,60	20,33	10,77	11,64	10,73	11,04
7 Pengangkutan dan komunikasi	14,08	18,75	14,87	15,90	10,20	14,82	12,11	12,37
8 Keuangan, perumahan dan jasa perusahaan	19,96	25,13	21,79	22,29	11,21	16,80	14,84	14,28
9 Jasa jasa	43,65	22,90	16,22	27,59	6,10	4,27	6,21	5,53
PDB	17,40	17,92	16,57	17,29	6,23	8,19	7,65	7,36

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012

Berdasarkan Tabel 4.5 Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu tahun 2008-2011 sekitar 7,36 persen. Sektor keuangan, perumahan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar 16,80 persen, namun mengalami penurunan sebesar 1,96 persen pada tahun 2011. Meskipun mengalami penurunan,

sektor tersebut masih berada pada tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2011 sebesar 4,11 persen dibandingkan pada tahun 2010. Namun pertumbuhan rata-rata sektor tersebut tidak sebesar pertumbuhan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran struktur ekonomi lambat laun akan beralih pada sektor modern.

3. Keuangan Daerah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tidak langsung berasal dari masyarakat melalui pembayaran pajak. Realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2010 sebesar Rp 2.444,74 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.619,00 miliar atau sebesar 66,22 persen dan belanja langsung sebesar Rp 824,57 atau sebesar 33,73 persen miliar. Posisi keuangan sebagaimana dalam Tabel ringkasan realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2010 di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Ringkasan penjabaran APBD/RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013

No	Jenis pengeluaran	Tahun (ribu rupiah)		
		2008	2009	2010
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.332.638.511	1.236.898.965	1.619.004.415
1	Belanja Pegawai	413.690.300	48.1693.704	544.423.177
2	Belanja Bunga	318.270	229.376	400.000
3	Belanja Subsidi	0	0	0
4	Belanja Hibah	0	0	0
5	Belanja Bantuan Sosial	151.586.443	73.519.402	27.032.335
6	Belanja Bagi Hasil	423.728.417	362.740.344	55.389.594
7	Belanja Bantuan Keuangan	329.563.873	318.120.459	407.759.309
8	Pengeluaran Tidak Terduga	3.751.208	595.680	15.000.000
B	BELANJA LANGSUNG	811.882.058	885.292.826	824.574.285
1	Belanja Pegawai	101.518.645	121.502.604	118.362.886
2	Belanja Barang dan Jasa	435.182.478	467.927.554	476.217.298
3	Belanja Modal	275.180.935	295.862.668	229.994.101
C	PEMBIAYAA DAERAH	207.773.765	237.264.440	1.158.551
JUMLAH		2.342.294.334	2.359.456.231	2.444.737.251

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012

4. Pendapatan Masyarakat

Tingkat pertumbuhan PDRB perkapita dapat dipakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat. Dimana PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah bruto per penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan nyata pendapatan perkapita. Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan tahun 2012, pendapatan perkapita bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar Rp 10,82 juta meningkat menjadi Rp 16,93 juta rupiah pada tahun 2011.

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan suatu daerah dapat memberikan gambaran kemajuan perekonomian suatu daerah yang dapat diukur dari besarnya pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi yaitu, rumah tangga konsumen, rumah tangga swasta, dan pemerintah serta ekspor bersih. Berdasarkan data pada Tabel 4. Besarnya PDRB menurut penggunaannya mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp 137,39 triliun. Penggunaan terbesar adalah pada sektor konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 66,24 triliun atau sebesar 48,23 persen, mengalami peningkatan sebesar 11,15 persen dibandingkan dengan tahun 2010. Sedangkan konsumsi pemerintah sebesar 29.46 persen dan pembentukan modal sebesar 23,66 persen dan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 24,04 persen dan 17,84 persen. Dengan adanya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah akan terus mengalami peningkatan di masa-masa yang akan datang.

Tabel 4.7 Produk domestik bruto menurut penggunaan atas dasar harga konstan tahun 2000 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2011

Komponen	Tahun (ribu rupiah)			
	2008	2009	2010	2011
Konsumsi Rumah Tangga	47.393.155,07	52.760.916,53	59.616.780,13	66.264.062,13
Konsumsi Nirlaba	569.680,36	785.657,90	913.608,10	1.057.787,01
Konsumsi Pemerintah	14.718.799,81	21.779.659,32	32.627.339,96	40.471.286,02
Pembentukan Modal	17.239.191,22	22.274.612,09	27.581.958,11	32.502.998,34
Perubahan Stok	1.293.645,73	1.021.148,55	339.385,22	2.380.556,57
Ekspor	32.153.469,60	28.582.418,22	36.426.092,70	30.148.742,66
Impor	28.224.750,50	27.269.824,87	39.642.954,17	35.435.553,34
PDRB	85.143.191,27	99.954.589,75	117.862.210,18	137.389.879,40

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2012

C. Arah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan agar arah pembangunan di Sulawesi Selatan memiliki arah yang jelas dan dapat terukur.

1. RPJM Pertama (2008-2013)

Tahap pertama dari RPJP Sulsel 2008-2013 pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan struktur tata ruang sebagai upaya awal untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai entitas–sosial-ekonomi yang

berkeadilan, asri, dan lestari. Untuk maksud tersebut, maka prasarana transportasi perlu ditingkatkan, khususnya pada koridor yang menghubungkan Makassar-Parepare, koridor yang menjadi bagian dari trans Sulawesi, dan koridor Sulawesi selatan bagian Selatan (Makassar-Bantaeng-Bone). Keberadaan koridor ini akan mendukung pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi yang diupayakan melalui pengembangan kawasan andalan. Pada tahap pembangunan ini, revitalisasi dan restrukturisasi kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Selatan dimulai kembali. Revitalisasi dimaksud meliputi upaya-upaya untuk mentransformasikan potensi spesifik yang dimiliki kawasan bersangkutan menjadi keunggulan lokal, sedangkan restrukturisasi ditekankan pada peningkatan interkonsitas antarkawasan andalan yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya sinergi antarkomoditas dan atau pelaku pembangunan pada masing-masing kawasan.

Kegiatan pada setiap kawasan andalan yang berbasis pertanian ditekankan pada intensifikasi sektor pertanian, peremajaan tanaman, serta prinsip-prinsip agrobisnis agar mampu secara efisien menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi di pasar lokal, nasional atau bahkan di pasar global, serta sebagai bahan baku yang berkualitas untuk proses industri (agroindustri). Di samping itu, pengembangan komoditi khusus dan bernilai tinggi, seperti pangan hasil pertanian organik, udang dan hasil perikanan lainnya perlu terus didorong. Upaya ini merupakan salah satu contoh untuk mentransformasikan potensi lokal menjadi keunggulan lokal.

Upaya peningkatan kedaulatan pangan serta inisiasi pertanian untuk energi (*bio-feul*) difokuskan pula pada kawasan andalan. Diupayakan agar tarik ulur (*trade off*) antara kedua program ini tidak akan bermuara pada semakin tidak terjangkaunya pangan bagi kebanyakan masyarakat yang pada gilirannya dapat bermuara pada menurunnya gizi masyarakat.

Ringkasnya program yang diuraikan di atas secara implisit menunjukkan bahwa aspek pertumbuhan ekonomi ditekankan pada peningkatan output sekaligus permintaan akhir (*final demand*). Peningkatan output dilakukan melalui intensifikasi sektor primer dan pengembangan sektor industri, khususnya agro-industri, sedangkan peningkatan permintaan akhir dilakukan dengan meningkatkan konsumsi, ekspor dan investasi baik dari pemerintah maupun dari swasta nasional dan lembaga-lembaga multinasional. Konsumsi dipicu melalui peningkatan daya beli penduduk Sulawesi Selatan. Upaya peningkatan dimaksud tercermin pada pemilihan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pelibatan petani dalam kegiatan agribisnis. Kebijakan ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan kelompok dimaksud dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi (*final demand*). Selain itu, peningkatan daya beli kelompok tersebut, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Sulawesi Selatan, akan memperbaiki kualitas hidup mereka, khususnya dilihat dari aspek pendidikan dan kesehatan. Semuanya itu, akan bermuara pada percepatan laju peningkatan IPM Sulsel.

2. RPJM Kedua (2013-2018)

Pada tahap pembangunan ini, upaya rivitalisasi dan restrukturisasi kawasan andalan terus dilanjutkan dengan penekanan yang sedikit berbeda. Tahap awal revitalisasi diharapkan telah diselesaikan pada tahapan pembangunan sebelumnya, sehingga pada tahap ini kegiatan dapat semakin difokuskan pada penguatan keunggulan lokal yang dimiliki oleh setiap kawasan. Penguatan dimaksud memiliki *spectrum* yang luas, mulai dari peningkatan proses dan manajemen produksi, aspek kelembagaan kawasan yang tidak saja terkait dengan sosial-ekonomi tetapi juga menyentuh aspek sosial-budaya, serta aspek finansial. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan struktur ekonomi kawasan, yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya sektor industri dan jasa.

Restrukturisasi kawasan andalan pada tahapan pembangunan ini memasuki babak baru, berupa penekanan pada upaya-upaya peningkatan kualitas interkoneksi fungsional antarkawasan berupa keterkaitan industrial yang mewujud dalam bentuk keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan atau keterkaitan kebelakang (*backward linkage*). Inisiasi yang dilakukan pada tahapan pembangunan sebelumnya, telah membuat struktur ekonomi Sulawesi Selatan menjadi semakin kuat, dalam arti kapasitas untuk berkembang menjadi semakin besar, antara lain berupa keberadaan beberapa industri strategis baru di Makassar dan di wilayah lainnya. Kecendrungan itu perlu diupayakan untuk terus dipertahankan

dengan memelihara dan meningkatkan daya tarik Sulawesi Selatan, di bidang kelembagaan serta daya tarik wilayah, berupa prasarana wilayah yang semakin baik serta ketersediaan tenaga kerja trampil dan berpengetahuan sebagai hasil upaya pembangunan pada tahap-tahap sebelumnya.

3. RPJM Ketiga (2018-2023)

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ketiga diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan mengandalkan peran serta lembaga-lembaga masyarakat yang semakin berkualitas untuk menghasilkan berbagai pilihan kepada masyarakat dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memilih di semua bidang kehidupan kemasyarakatan.

Pembangunan kawasan andalan tetap menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi bagian dari kawasan andalan. Pada tahap pembangunan ini, upaya-upaya diarahkan untuk semakin memperkuat kelembagaan masyarakat kawasan sehingga semakin mampu mengembangkan kawasan dimaksud secara lebih mandiri dengan tetap membuat peluang bagi kehadiran swasta nasional maupun asing.

Kebijakan untuk menjadikan kawasan andalan sebagai basis bagi terwujudnya kedaulatan pangan serta ketersediaan pasokan bagi

bioenergi tetap menjadi acuan dalam pengembangan kawasan andalan. Di samping itu, perhatian yang lebih besar semestinya diberikan pula kepada upaya-upaya untuk memperkuat keterkaitan industrial antarkawasan. Untuk maksud tersebut, penataan prasarana wilayah, khususnya transportasi, perlu terus ditingkatkan agar aksesibilitas antarkawasan dan antarakawasan dengan pasar, termasuk pelabuhan dan bandara, dapat ditingkatkan. Kelembagaan sosial-ekonomi antarkawasan yang merupakan *soft structure* interkonesitas antarakawasan perlu pula terus dikembangkan dan ditingkatkan.

4. RPJM Keempat (2023-2028)

Program prioritas pada tahap ini adalah program-program yang memanfaatkan momentum pembangunan yang berhasil dipicu pada tiga tahapan pembangunan sebelumnya dan program-program untuk menyempurnakan dan atau mengisi celah kebutuhan pembangunan yang tidak sempat dirampungkan pada tahapan-tahapan pembangunan yang lalu, terutama pada paruh terakhir, program-program yang bersifat evaluatif dan inisiatif mulai dilakukan untuk mempersiapkan landasan yang kokoh bagi tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya.

Keterkaitan fungsional antarkawasan andalan serta pembangunan industri-industri pada tahapan pembangunan sebelumnya melahirkan dampak positif, yaitu terbangunnya aglomerasi industri di Sulawesi Selatan yang membuat proses industri di provinsi ini menjadi semakin

efisien yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan investasi. Untuk memelihara momentum itu, diperlukan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah, antara lain berupa ketersediaan energi, aksesibilitas dan pelayanan yang semakin baik di bandara dan di pelabuhan, serta ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Upaya lain berupa tawaran intensif dan sejenis perlu ditingkatkan.

Aglomerasi industri yang dimaksud di atas memperkuat dan sekaligus diperkuat oleh kehadiran fasilitas pelayanan regional yang telah berkembang sejak tahap-tahap pembangunan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong upaya-upaya masyarakat (swasta) untuk terus melakukan diversivitas jenis pelayanan yang tentu saja tanpa melupakan kualitasnya. Kesemuanya akan lebih memperkuat posisi Makassar sebagai pusat pelayanan dan *main hubs* dalam arti sebenarnya, yaitu tidak saja secara institusional tetapi diakui dan didukung oleh para pemangku kepentingan.

Berdasarkan arah pembangunan tersebut, nampak bahwa arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan sektor sekunder dan tersier. upaya revitalisasi dan restrukturisasi kawasan andalan menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pada tahap-tahap pelaksanaannya, upaya transformasi potensi tiap-tiap kawasan lebih ditekankan pada tahap

awal dan selanjutnya lebih pada interkoneksi fungsional antarkawasan andalan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Struktur Permintaan dan Penawaran

Struktur permintaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan besarnya barang dan jasa yang diminta oleh sektor-sektor produksi maupun pelaku-pelaku ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Besarnya permintaan sektor-sektor produksi digambarkan dalam permintaan antara, sedangkan permintaan dari pelaku-pelaku ekonomi terdiri atas permintaan domestik dan permintaan luar wilayah dan luar negeri (ekspor). Sementara itu, struktur penawaran barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan besarnya input, baik input antara, input primer maupun impor, yang ditawarkan oleh sektor-sektor produksi maupun pelaku ekonomi untuk memenuhi permintaan dari sektor-sektor produksi di Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel berikut menunjukkan sektor ekonomi dengan jumlah permintaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009.

Tabel 5.1 Jumlah permintaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Lapangan Usaha	Permintaan Antara (juta rupiah)	Permintaan Akhir (juta rupiah)		Total
			Domestik	Ekspor	
1	Pertanian	21.744.856	12.723.033	10.398.353	44.866.242
2	Pertambangan dan penggalian	1.608.567	2.292.589	6.001.991	9.903.147
3	Industri pengolahan	33.831.688	29.412.010	19.894.428	83.138.126
4	Listrik, gas & air bersih	1.571.059	1.788.664	-	3.359.723
5	Bangunan	1.858.551	15.334.219	-	17.192.770
6	Perdagangan, hotel & restoran	8.488.937	10.744.769	3.264.035	22.497.741
7	Angkutan & komunikasi	6.609.936	6.065.124	2.077.147	14.752.207
8	Keuangan, persewaan/jasa perus	4.727.315	3.481.835	109.971	8.319.121
9	Jasa-jasa	114.653	22.378.237	34.362	22.527.252
Jumlah		80,555,562	104.220.480	41.780.287	226.556.329

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.1, pada tahun 2009, permintaan terhadap barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 226,56 triliun. Permintaan tersebut terdiri dari permintaan antara sebesar 35,56 persen, permintaan domestik sebesar 46,00 persen akhir domestik dan sisanya sebesar 18,44 persen merupakan permintaan dari konsumen di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau ekspor. Permintaan terbesar berasal dari permintaan sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp 83,14 triliun atau sebesar 36,70 persen dari total permintaan, dan diikuti oleh sektor pertanian sebesar 19,80 persen. Sementara itu, permintaan terendah berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih yang hanya mencapai sebesar 1,48 persen.

Tabel 5.2 Jumlah penawaran barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Lapangan Usaha	Penawaran (juta rupiah)		Total
		Impor	Output Domestik	
1	Pertanian	2,776,416	42,449,235	44.856.217
2	Pertambangan dan penggalian	385,501	9,516,627	9.900.154
3	Industri pengolahan	35,440,365	48,225,192	83.138.759
4	Listrik, gas & air bersih	393,419	2,969,295	3.362.714
5	Bangunan	-	17,189,894	17.192.120
6	Perdagangan, hotel & restoran	32,680	22,456,625	22.507.910
7	Angkutan & komunikasi	2,070,612	12,681,451	14.752.216
8	Keuangan, persewaan/jasa perus	125,319	8,194,366	8.319.137
9	Jasa-jasa	25,119	22,507,703	22.527.102
Jumlah		41,247,431	186,190,388	226,556,329

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Untuk memenuhi permintaan barang dan jasa tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan memenuhinya dari produksi domestik sebesar Rp 186,19 triliun atau sebesar 81,79 persen, sedangkan sisanya diimpor dari luar wilayah sebesar 18,21 persen. Penawaran barang dan jasa terbesar berasal dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 83,14 triliun atau sebesar 36,70 persen selanjutnya sektor pertanian sebesar 19,80 persen sedangkan sektor dengan jumlah penawaran terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 1,48 persen.

Tabel 5.3 Persentase permintaan dan penawaran barang dan jasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Lapangan usaha	Permintaan			Penawaran			
		Permintaan antara	Domestik	Ekspor	Total	Impor	Output Domestik	Total
1	Pertanian	48.19	28.51	23.30	100	6.22	93.78	100
2	Pertambangan dan penggalian	16.24	23.15	60.61	100	3.87	96.13	100
3	Industri pengolahan	40.69	35.38	23.93	100	42.63	57.37	100
4	Listrik, gas & air bersih	46.83	53.17	0.00	100	11.70	88.30	100
5	Bangunan	10.81	89.19	0.00	100	0.00	100.00	100
6	Perdagangan, hotel & restoran	37.76	47.74	14.50	100	0.15	99.85	100
7	Angkutan & komunikasi	44.81	41.11	14.08	100	14.04	85.96	100
8	Keuangan, persewaan/jasa perus	56.83	41.85	1.32	100	1.51	98.49	100
9	Jasa-jasa	1.54	98.31	0.15	100	0.11	99.89	100
Jumlah		35.56	46.00	18.44	100	18.21	81.79	100

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan data Input output Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, struktur permintaan dan penawaran untuk setiap sektornya, memperlihatkan bahwa sektor pertanian dari sisi penawaran sebesar Rp 42,45 triliun atau sebesar 93,78 persen mampu disediakan oleh produsen domestik, dan sebesar 6,22 persen berasal dari luar wilayah. Dari Jumlah penawaran tersebut dialokasikan untuk memenuhi konsumsi antara sebesar 48,19 persen, untuk konsumsi domestik sebesar 28,51 persen, dan sisanya sebesar 23,30 persen untuk ekspor. Dari komposisi penawaran, dapat dikatakan bahwa untuk produk-produk pertanian ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap wilayah lain relatif kecil karena untuk memenuhi permintaan dalam wilayah sebagian besar telah dihasilkan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan dari komposisi

permintaan, masih diproses lebih lanjut menjadi barang lain yang secara ekonomis tentunya menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Hal ini merupakan suatu indikasi yang positif bagi sistem perekonomian Sulawesi Selatan.

Sektor pertambangan dan penggalian mempunyai struktur permintaan yang berbeda dengan sektor pertanian. Pada sektor ini sebagian besar dari penawaran yang ada dialokasikan untuk ekspor yaitu sebesar 60,61 persen, sedangkan untuk permintaan antara dan konsumsi domestik masing-masing hanya sebesar 16,24 persen dan 23,15 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa belum terdapat industri lanjutan untuk produk pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada sektor industri pengolahan nampak bahwa dari sisi penawaran maupun permintaan memperlihatkan persebaran yang hampir merata. Jumlah permintaan barang-barang hasil industri dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai Rp 83,14 triliun. Dari jumlah tersebut, untuk memenuhi permintaan di sektor-sektor produksi mencapai Rp 33,83 triliun atau sebesar 40,69 persen, konsumsi domestik sebesar Rp 29,41 triliun atau sebesar 35,38 persen dan ekspor sebesar Rp 19,89 triliun atau sebesar 23,83 persen. Untuk memenuhi permintaan tersebut, sebesar 57,37 persen mampu disediakan atau diproduksi sendiri dan sisanya sebesar 42,63 persen harus didatangkan dari wilayah lain. Masih relatif besarnya nilai impor tersebut memberikan indikasi bahwa

perekonomian Sulawesi Selatan mempunyai ketergantungan yang relatif cukup tinggi terhadap wilayah lain.

Untuk sektor lainnya, seperti listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya, struktur penawarannya sebagian besar berasal dari produksi domestik. Begitu juga dengan struktur permintaannya, sebagian besar untuk memenuhi permintaan di sektor-sektor produksi dan konsumsi domestik.

2. Struktur Input

Struktur input terdiri dari dua komponen, yaitu input antara (*intermediate input*) dan input primer (*primer input*). Besarnya input yang dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan untuk memproduksi suatu barang dan jasa berasal dari input antara berupa output dari sektor-sektor produksi yang berasal dari dalam wilayah maupun berasal dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan input primer berupa biaya yang dikeluarkan atas adanya proses produksi. Tabel berikut menunjukkan sektor ekonomi dengan persentase biaya di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009.

Tabel 5.4 Persentase biaya antara dan biaya primer Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Lapangan Usaha	Biaya Antara			Biaya Primer/nilai Tambah Bruto					Output
		Domes tik	Impor	Jumlah	Upah/ Gaji	Surplus Usaha	Penyu sutan	Paja k Tak Lang	Jumlah	
1	Pertanian	22,01	6,19	28,20	12,77	56,75	1,55	0,73	71,80	100
2	Pertambangan dan penggalian	29,19	3,87	33,07	18,76	37,58	7,79	2,81	66,93	100
3	Industri pengolahan	42,49	42,63	85,12	4,39	8,47	1,21	0,81	14,88	100
4	Listrik, gas & air bersih	59,67	11,70	71,37	13,33	-4,13	19,39	0,04	28,63	100
5	Bangunan	67,45	-	67,45	12,69	15,43	2,93	1,50	32,55	100
6	Perdagangan, hotel & restoran	21,07	0,15	21,21	18,50	50,37	4,61	5,30	78,79	100
7	Angkutan & komunikasi	36,37	14,04	50,40	11,12	25,65	12,02	0,80	49,60	100
8	Keuangan, persewaan/jasa perus	15,79	1,51	17,29	17,47	58,33	4,47	2,45	82,71	100
9	Jasa-jasa	33,02	0,11	33,13	62,23	1,07	3,47	0,01	66,87	100
JUMLAH		35,56	18,21	53,76	15,51	26,02	3,35	1,36	46,24	100

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Secara keseluruhan sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun 2009 menunjukkan persentase input antara sebesar 53,76 persen dan input primernya sebesar 46,24 persen dari total input. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan secara umum untuk memproduksi suatu barang dan jasa dibutuhkan biaya bahan input sebesar 53,76 persen dan biaya faktor produksi sebesar 46,24 persen. Untuk memproduksi suatu barang dan jasa suatu unit kegiatan ekonomi tergantung pada komponen barang impor sebesar 18,21 persen dan komponen domestik sebesar 35,56 persen dari total input.

Struktur input primer yang merupakan biaya faktor produksi, komponen yang terlihat menonjol adalah surplus usaha yaitu 26,02 persen dan yang terendah adalah komponen pajak tak langsung sebesar 1,36

persen dari total input. Untuk komponen lainnya, upah dan gaji sebesar 15,51 persen dan penyusutan barang modal sebesar 3,35 persen.

Dikategorikan komponen input antara tinggi atau rendah berdasarkan nilai persentase rata-rata input antara seluruh sektor, dikatakan tinggi apabila di atas nilai persentase rata-rata dan rendah jika di bawah nilai persentase rata-rata dari seluruh sektor. Interpretasi secara umum, komponen input antara tinggi mengindikasikan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang relatif rendah demikian pula sebaliknya. Komponen input antara yang tergolong tinggi adalah sektor industri pengolahan sebesar 85,12 persen, listrik, gas dan air bersih sebesar 71,37 persen, dan bangunan sebesar 67,45 persen, sedangkan yang tergolong rendah adalah selain sektor yang telah disebutkan.

Sektor pertanian yang merupakan sektor basis Sulawesi Selatan memperlihatkan biaya antara sebesar 28,20 persen dan biaya primer sebesar 71,80 persen. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan teknologi sektor pertanian dapat dikatakan sudah cukup baik. Begitu juga dengan lima sektor lainnya, yaitu sektor pertambangan dan penggalan, sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa.

Adanya biaya primer sektor pertanian yang relatif besar yaitu sebesar 71 persen menunjukkan bahwa sektor ini mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk faktor-faktor produksi dibandingkan dengan biaya bahan

baku yang hanya sebesar 28,20 persen. Persentase komponen upah dan gaji masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan persentase rata-rata daerah tetapi surplus usaha berada jauh di atas persentase rata-rata daerah. Nilai biaya penyusutan jauh di bawah rata-rata daerah karena rendahnya penggunaan barang-barang modal dalam sektor ini. Sementara itu, sebagai sektor primer yang menyediakan bahan baku bagi sektor ekonomi lainnya sektor ini juga mengeluarkan biaya pajak yang relatif rendah. Angka tersebut disumbangkan dari besarnya impor dan ekspor pertanian Sulawesi Selatan.

3. Struktur Output

Output merupakan nilai produksi baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Dengan menelaah besarnya output yang diciptakan oleh masing-masing sektor, berarti akan diketahui sektor-sektor yang mampu memberikan sumbangan yang besar dalam membentuk output secara keseluruhan di suatu wilayah. Tabel berikut menunjukkan sektor ekonomi dengan nilai tambah bruto di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 yang diperoleh dari besarnya total output setiap sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikurangi dengan jumlah permintaan antara tiap-tiap sektor atau besarnya permintaan akhir dari masing-masing sektor.

Tabel 5.5 Nilai tambah output bruto Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Kode	Sektor	Nilai (miliar rupiah)	Kontribusi (%)
1		Pertanian	23.111.361	15,83
2		Pertambangan dan penggalian	8.291.587	5,68
3		Industri pengolahan	49.307.071	33,77
4		Listrik, gas & air bersih	1.791.655	1,22
5		Bangunan	15.333.569	10,50
6		Perdagangan, hotel & restoran	14.018.973	9,60
7		Angkutan & komunikasi	8.142.280	5,58
8		Keuangan, persewaan/jasa perus	3.591.822	2,46
9		Jasa-jasa	21.412.449	15,35
Jumlah			146.000.767	100

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mampu menghasilkan output bruto sebesar Rp 49,31 triliun atau sebesar 33,77 persen dari seluruh permintaan akhir di Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor pertanian berada pada urutan kedua dengan kontribusi sebesar 15,83 persen dan selanjutnya sektor jasa-jasa yang sebesar 15,35 persen, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih hanya mampu menghasilkan output bruto sebesar 1,22 persen, yang merupakan sektor dengan kontribusi terkecil dari seluruh sektor dasar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Besarnya kontribusi sektor pertanian tersebut terdiri atas permintaan domestik sebesar 28,51 persen dan ekspor sebesar 23,30

persen. Dari total output yang dihasilkan oleh sektor pertanian, sebanyak 51,81 persen merupakan permintaan akhir sedangkan selebihnya digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mampu memberikan sumbangan yang besar dalam menciptakan output secara keseluruhan dalam perekonomian Sulawesi Selatan.

4. Struktur Nilai Tambah Bruto

Nilai tambah bruto adalah balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi. Besarnya nilai tambah di tiap-tiap sektor ditentukan oleh besarnya output nilai produksi yang dihasilkan serta jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Oleh karena itu, suatu sektor yang memiliki output yang besar belum tentu memiliki nilai tambah yang besar tergantung dari biaya produksi yang dikeluarkannya.

Tabel 5.6 Nilai tambah bruto menurut sektor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Kode	Sektor	Nilai (miliar rupiah)	Kontribusi (%)
1		Pertanian	32.205914	30,74
2		Pertambangan dan penggalian	6.626.459	6,35
3		Industri pengolahan	12.369.815	11,80
4		Listrik, gas & air bersih	962.690	0,92
5		Bangunan	5.595.249	5,34
6		Perdagangan, hotel & restoran	17.733.490	16,92
7		Angkutan & komunikasi	7.316.376	6,98
8		Keuangan, persewaan/jasa perus	6.880.443	6,57
9		Jasa-jasa	15.062.900	14,38
Jumlah			104.753,336	100

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.6 memperlihatkan besarnya nilai tambah bruto tiap-tiap sektor di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tabel tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih merupakan kegiatan usaha yang dominan penciptaan nilai tambah di Sulawesi Selatan. Sektor ini mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp 32,21 triliun atau mempunyai peran sebesar 30,74 persen dari seluruh nilai tambah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, serta sektor jasa-jasa yang masing-masing sebesar 16,93 persen dan 14,38 persen, sedangkan sektor yang menciptakan nilai tambah paling kecil yaitu sektor listrik, gas

dan air bersih sebesar 00,92 persen dari nilai tambah yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Besarnya nilai tambah bruto sektor pertanian disebabkan oleh besarnya partisipasi tenaga kerja di Sulawesi Selatan pada sektor tersebut, sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.3, yaitu sebesar 49,30 persen dari total tenaga kerja pada tahun 2009. Komposisi terbesar berasal dari surplus usaha sebesar Rp 25,45 triliun atau 79,03 persen, sedangkan upah dan gaji sebesar Rp 5,729,177 triliun atau 17,79 persen. Besarnya surplus usaha tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mampu mengalami pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. Namun, besarnya nilai tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dari besarnya upah dan gaji rata-rata yang diterimanya.

Tabel 5.7 Komposisi nilai tambah bruto menurut komponennya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

Kode	Komponen	Nilai (juta rupiah)	Distribusi (%)
201	Upah dan gaji	35.143.436	33,55
202	Surplus usaha	58.943.392	56,27
203	Penyusutan	7.589.132	7,24
204	Pajak tak langsung	3.077.378	2,94
Nilai tambah bruto		104.753.336	100

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2009 (diolah)

Jika diperhatikan nilai tambah bruto menurut komponennya, seperti pada Tabel 5.7, bahwa sebagian besar nilai tambah tersebut berasal dari komponen surplus usaha. Nilai surplus usaha dalam perekonomian

Sulawesi Selatan pada tahun 2009 mencapai Rp 58,94 triliun atau sebesar 56,27 persen. Komponen upah dan gaji juga cukup besar, yaitu Rp 35,14 triliun atau sebesar 33,55 persen dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan di Sulawesi Selatan, sedangkan komponen penyusutan dan pajak tak langsung peranannya tidak terlalu besar, masing-masing hanya mencapai 7,24 persen dan 2,94 persen. Apabila diamati lebih seksama, struktur nilai tambah sebagaimana yang tertera pada Tabel 5.7 ternyata porsi yang diterima untuk upah dan gaji masih relatif rendah bila dibandingkan dengan surplus usaha, padahal upah dan gaji merupakan komponen yang bisa langsung diterima oleh pekerja, sedangkan surplus usaha diterima oleh pengusaha. Surplus usaha belum tentu dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya tenaga kerja, karena surplus usaha tersebut sebagian ada yang disimpan atau ditanamkan di perusahaan dalam bentuk laba yang ditahan.

5. Struktur Permintaan Akhir

Pendapatan suatu wilayah pada dasarnya memenuhi persamaan $Y = C + G + I + (X - M)$, dimana Y adalah pendapatan, dalam konteks I-O sama dengan PDRB atau total nilai tambah, C adalah konsumsi rumah tangga, G adalah konsumsi pemerintah, X-M adalah ekspor neto. Mengamati perkembangan komponen ini sangat penting untuk diikuti khususnya komponen ekspor dan pembentukan modal tetap bruto. Komponen ekspor merupakan salah satu sumber devisa dan komponen pembentukan modal

tetap bruto merupakan komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi atau pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.8 Komposisi permintaan akhir menurut komponennya di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Komponen	Nilai (juta rupiah)	Distribusi (%)
1	Konsumsi rumah tangga	57.350.233	39,72
2	Konsumsi pemerintah	21.479.370	14,88
3	Pembentukan modal tetap bruto	21.648.345	14,99
4	Perubahan inventory	3.742.532	2,59
5	Ekspor	41.780.287	28,62
6	Jumlah permintaan akhir	146.000.767	100
7	Impor	41.247.431	28,57
	PDRB	104.753.336	71,75

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel I-O Sulawesi Selatan tahun 2009, perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan masih harus mendatangkan barang dan jasa dari luar wilayah sebesar Rp 41,24 triliun. Nilai impor ini merupakan 28,57 persen dari total permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan termasuk wilayah yang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap wilayah lainnya.

Komposisi komponen permintaan akhir dapat dilihat bahwa proporsi terbesar adalah konsumsi rumah tangga yang nilainya mencapai Rp 57,35 triliun atau 39,72 persen dari total permintaan akhir. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan masih kuat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi rumah tangga. Peranan pemerintah dalam perekonomian Sulawesi Selatan nampaknya cukup besar mencapai Rp 21,48 triliun atau 14,88 dari total permintaan akhir. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu bagian

yang terpenting dalam pembangunan ekonomi, kontribusinya sebesar Rp 21,645 triliun atau sekitar 14,99 persen dari total permintaan akhir. Kondisi ini penting untuk mendapatkan perhatian oleh semua pihak, karena PMTB secara langsung berkaitan dengan kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, peningkatan PMTB akan meningkatkan persediaan modal (*capital stock*), dan setiap penambahan persediaan modal akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Output perekonomian meningkat pada akhirnya akan mampu menyerap tenaga kerja atau akan mengurangi pengangguran.

6. Struktur Nilai Perdagangan Bersih (*Net Trade*)

Struktur nilai perdagangan bersih adalah selisih nilai dari ekspor dan impor barang dan jasa suatu perekonomian. Hubungan antara pelaku ekonomi domestik dan luar negeri tersebut mempengaruhi terhadap besarnya penerimaan devisa pada suatu perekonomian. Jika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor akan mengakibatkan surplus pada neraca perdagangan. Hal ini berarti akan terjadi penambahan cadangan devisa. Sebaliknya, jika nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor akan mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan, yang akhirnya mengurangi cadangan devisa. Selain itu, suatu sektor dapat dianggap

sebagai sektor kunci (*leading sector*) apabila mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.

Tabel 5.9 Persentase nilai perdagangan bersih menurut sektor Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Sektor	Distribusi				Perdagangan bersih	
		Impor (Rp juta)	Persen	Ekspor (Rp juta)	Persen	(Rp juta)	Persen
1	Pertanian	2.776.416	6,73	10.398.353	24,89	7.621.937	1.430,39
2	Pertambangan dan penggalian	383.501	0,93	6.001.991	14,37	5.618.490	1.054,41
3	Industri pengolahan	35.440.365	85,92	19.894.428	47,62	-1.554.593	-22917,47
4	Listrik, gas & air bersih	393.419	0,95	0	0,00	-393.419	-73,83
5	Bangunan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Perdagangan, hotel & restoran	32.680	0,08	3.264.035	7,81	3.231.355	606,42
7	Angkutan & komunikasi	2.070.612	5,02	2.077.147	4,97	6.535	1,23
8	Keuangan, persewaan/jasa perus	125.319	0,30	109.971	0,26	-15.348	-2,88
9	Jasa-jasa	25.119	0,06	34.362	0,08	9.243	1,73
Jumlah		41.247.431	100,00	41.780.287	100,00	532.856	100,00

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.9, menunjukkan nilai perdagangan bersih tiap-tiap sektor di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki nilai perdagangan bersih terbesar dari delapan sektor lainnya. Meskipun nilai ekspor sektor tersebut hanya sebesar 24,89 persen lebih kecil dari nilai ekspor sektor industri pengolahan, namun sektor tersebut memiliki ketergantungan terhadap impor yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan sektor industri pengolahan yang memiliki ketergantungan impor yang relatif sangat besar yaitu sebesar 85,29 persen. Sektor selanjutnya

yang memiliki nilai perdagangan bersih yang relatif tinggi adalah sektor penggalian dan pertambangan dan sektor perdagangan, perhotelan dan restoran yang masing-masing sebesar 1.054,41 persen dan 606,42 persen, sedangkan sektor lainnya memiliki nilai yang mendekati nol. Oleh karena itu, berdasarkan data di atas sektor pertanian merupakan sektor kunci (*leading sector*) di Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Analisis Keterkaitan

Salah satu keunggulan analisis dalam model I-O adalah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan atau keterkaitan antara sektor ekonomi. Keterkaitan antara sektor ekonomi dapat berupa keterkaitan ke belakang (*backward linkages*); berhubungan dengan bahan mentah atau bahan baku sedangkan hubungan keterkaitan ke depan (*forward linkages*) yang berhubungan dengan produksi/penjualan barang jadi.

a. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung

Untuk melihat besarnya keterkaitan langsung dan tidak langsung sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 digunakan persamaan 3.11 dan 3.12 sedangkan untuk mengukur besarnya keterkaitan tidak langsung ke belakang dan ke depan menggunakan persamaan 3.13 dan 3.14, sehingga diperoleh hasil sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10 Keterkaitan langsung dan tidak langsung masing-masing menurut sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009

No	Sektor ekonomi	KLDi	KLBj	KTLDi	KTLBj
1	Pertanian	0,33588	0,22012	1,90980	1,32123
2	Pertambangan dan penggalian	0,18013	0,29193	1,21496	1,47456
3	Industri pengolahan	1,70486	0,42494	3,37893	1,60121
4	Listrik, gas dan air bersih	0,09647	0,59672	1,13970	1,93987
5	Bangunan	0,15446	0,67455	1,19596	2,04602
6	Perdagangan, hotel dan restoran	0,28417	0,21067	1,46146	1,31757
7	Angkutan dan komunikasi	0,29958	0,36369	1,42129	1,60027
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,20889	0,15787	1,33561	1,24828
9	Jasa-jasa	0,00629	0,33023	1,00878	1,51749
Rata-rata		0,36341	0,36341	1,56294	1,56294

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.10 Sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung ke depan relatif terbesar adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 1,70486, artinya output sektor industri pengolahan digunakan untuk memenuhi seluruh permintaan antara adalah sebanyak Rp 1,70486. Sementara sektor ekonomi yang paling besar memberikan efek langsung ke belakang adalah sektor bangunan, karena memiliki angka keterkaitan langsung ke belakang terbesar yaitu 0,67455, artinya untuk menghasilkan output sebesar Rp 1 sektor tersebut membutuhkan input antara sebanyak Rp 0,67455. Hal ini tidak berbeda dengan angka keterkaitan tidak langsung ke depan dan keterkaitan tidak langsung ke belakang yang menunjukkan pada sektor yang sama. Besarnya angka keterkaitan tidak langsung ke depan sektor industri pengolahan yaitu 3,37893 menunjukkan bahwa total output yang

dibutuhkan untuk memenuhi sebanyak Rp 1 permintaan antara seluruh sektor yaitu sebesar Rp 3,37893, sedangkan untuk keterkaitan tidak langsung ke belakang memiliki angka sebesar 2,04602 artinya sektor bangunan membutuhkan total input sebanyak Rp 2,04602 untuk menghasilkan output sebesar Rp 1 dari seluruh sektor.

Sektor pertanian memiliki keterkaitan langsung ke depan dan ke belakang yang relatif kecil. Untuk memenuhi kebutuhan input keseluruhan sektor ekonomi sebesar Rp 1, sektor pertanian harus mampu menghasilkan output sebanyak Rp 0,33588. Begitu juga dengan keterkaitan ke belakang sektor pertanian yang membutuhkan sebanyak Rp 0,22012 input dari sektor ekonomi lainnya secara langsung untuk mampu meningkatkan outputnya sebanyak Rp 1. Sementara itu, untuk meningkatkan output sebanyak Rp 1 pada seluruh sektor lainnya secara tidak langsung membutuhkan input dari sektor pertanian sebanyak Rp 1,90980, sedangkan sektor ini membutuhkan input sebanyak Rp 1,32123 dari sektor lainnya secara tidak langsung.

Tabel 5.11 Keterkaitan langsung dan tidak langsung sektor pertanian terhadap sektor ekonomi lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009

No	Sektor ekonomi	KLDi	KLBj	KTLDi	KTLBj
1	Pertanian	0,06945	0,06945	1,10717	1,10717
2	Pertambangan dan penggalian	0,00002	0,00000	0,04862	0,00052
3	Industri pengolahan	0,20847	0,10303	0,26780	0,13880
4	Listrik, gas dan air bersih	0	0,00003	0,12943	0,00164
5	Bangunan	0,00063	0,00004	0,14104	0,00140

6	Perdagangan, hotel dan restoran	0,03089	0,03215	0,06721	0,04308
7	Angkutan dan komunikasi	0,00047	0,00775	0,05362	0,01377
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0	0,00762	0,01275	0,01468
9	Jasa-jasa	0,02596	0,00005	0,08217	0,00016

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel 5.11 besarnya output sektor pertanian yang akan digunakan sebagai input oleh sektor-sektor ekonomi lainnya, dimana permintaan relatif terbesar berasal dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp 0,20847 jika sektor tersebut ingin meningkatkan outputnya sebesar Rp 1, kemudian diikuti oleh sektor pertanian itu sebesar Rp 0,06945. Besarnya keterkaitan kedua sektor tersebut terhadap sektor pertanian menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan yang relatif besar terhadap kedua sektor tersebut dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Sementara itu, sektor pertanian tidak memiliki keterkaitan ke depan secara langsung sama sekali terhadap sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Hal yang serupa juga terlihat pada keterkaitan ke belakang secara langsung sektor pertanian terhadap ke dua sektor tersebut, yaitu 0,10303 dan 0,06945.

Secara tidak langsung keterkaitan ke depan sektor pertanian memperoleh permintaan dari seluruh sektor dengan permintaan tertinggi berasal dari sektor pertanian yaitu sebesar 1,10717 dan diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 0,26780. Secara

tidak langsung keterkaitan ke belakang relatif tinggi adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 1,10717 dan 0,13880. Tabel 5.11 juga menunjukkan bahwa sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan secara tidak langsung ke depan memiliki permintaan sebesar 0,12943 dan 0,01275 dari sektor pertanian meskipun secara langsung kedua sektor ini tidak memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan terhadap sektor ekonom lainnya.

b. Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan

Selain menggunakan persamaan di tersebut, untuk mengukur keterkaitan ke depan dan ke belakang juga digunakan persamaan 3.15 dan 3.16 untuk mengukur besarnya indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari persamaan tersebut diperoleh hasil sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 5.11.

Tabel 5.12 Daya penyebaran dan indeks kepekaan menurut sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009

No	Sektor ekonomi	Daya Penyebaran	Derajat Kepekaan
1	Pertanian	0,84534	1,22192
2	Pertambangan dan penggalian	0,94345	0,77736
3	Industri pengolahan	1,02448	2,16190
4	Listrik, gas dan air bersih	1,24116	0,72920
5	Bangunan	1,30908	0,76520
6	Perdagangan, hotel dan restoran	0,84300	0,93507
7	Angkutan dan komunikasi	1,02388	0,90937
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,79867	0,85455
9	Jasa-jasa	0,97092	0,64544

Total	9.00000	9.00000
Rata-rata	1.00000	1.00000

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan klasifikasi Sembilan sektor ekonomi, sektor-sektor yang memiliki indeks daya penyebaran di atas rata-rata sektor adalah sektor pembangunan, sektor listrik, gas dan air bersih sektor industri pengolahan dan sektor angkutan dan komunikasi. Indeks daya penyebaran dari keempat sektor tersebut masing-masing sebesar 1,02448, 1,24116, 1,30908, dan 1,02388 atau berpengaruh terhadap kenaikan output sektor lainnya. Sementara itu, lima sektor lainnya berada lebih kecil dari satu artinya permintaan dari sektor tersebut kurang berpengaruh terhadap kenaikan output sektor lainnya dalam perekonomian Sulawesi Selatan.

Keterkaitan dengan sektor-sektor hilir terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling peka terhadap perubahan permintaan akhir terhadap sektor-sektor hilirnya, dari Tabel 5.9 dapat dilihat bahwa indeks derajat kepekaan sektor industri pengolahan sebesar 2,16190. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan output di sektor industri pengolahan dapat mencapai 2,16190 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata peningkatan output di sektor lain apabila seluruh sektor ekonomi masing-masing mengalami kenaikan permintaan akhir sebesar 1 unit. Sektor-sektor

lainnya yang pembentukan outputnya juga relatif peka terhadap pergeseran permintaan akhir di sektor-sektor ekonomi lainnya adalah sektor pertanian yaitu sebesar 1,22192.

Besarnya derajat kepekaan sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan permintaan akhir di atas rata-rata sehingga sektor ini dapat digolongkan sebagai sektor strategis. Namun, berbeda dengan daya penyebarannya yang berada di bawah rata-rata, artinya sektor ini belum bisa dikasifikasikan sebagai sektor strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, besarnya derajat kepekaan sektor pertanian yang tidak diikuti oleh daya penyebarannya sehingga sektor ini tidak dapat dikategorikan sebagai sektor kunci dalam perekonomian Sulawesi Selatan.

c. Kelompok Indeks Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan

Indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan dapat disusun ke dalam empat kelompok/kudran, yaitu:

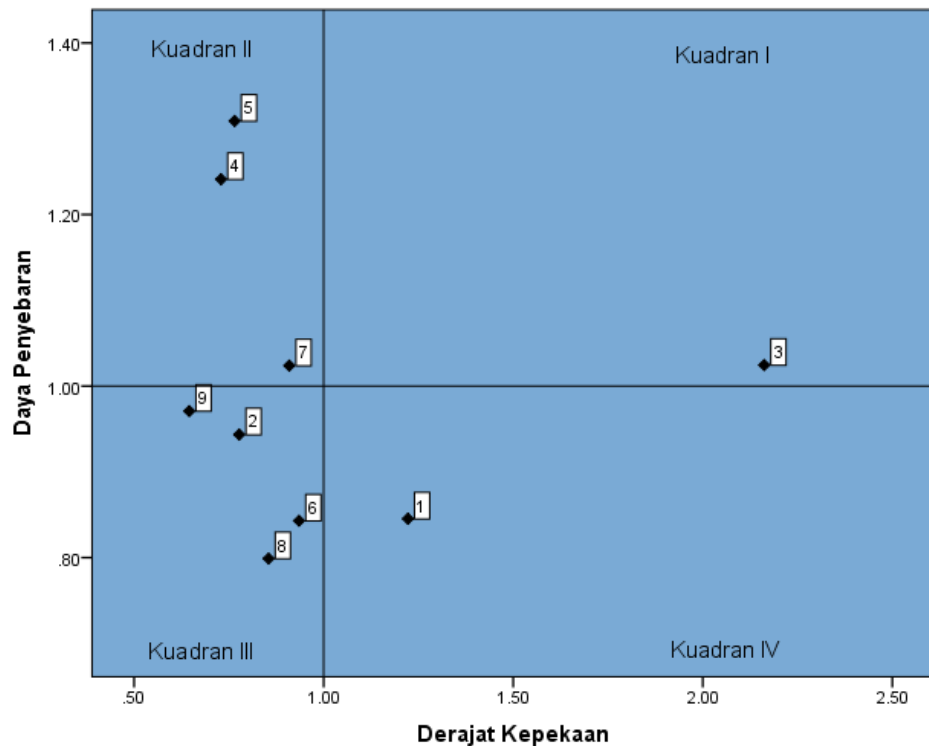
Kuadran I : Sektor-sektor yang memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi

Kuadran II : Sektor-sektor yang memiliki daya penyebaran tinggi dan derajat kepekaan rendah

Kuadran III : Sektor-sektor yang memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan rendah

Kuadran IV : Sektor-sektor yang memiliki daya penyebaran rendah dan derajat kepekaan tinggi

Indeks daya penyebaran atau derajat kepekaan suatu sektor dikatakan tinggi jika nilainya lebih dari 1, sebaliknya jika nilainya kurang dari 1 disebut rendah. Untuk lebih sederhananya keterkaitan antarsektor dapat dilihat pada Gambar 5.1 Nampak bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan baik pada sektor hulu dan sektor hilir. Artinya bahwa sektor industri pengolahan mampu mendorong sekaligus menarik sektor lain dalam meningkatkan output. Sektor pertanian mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain, dan daya dorong yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor lain, sedangkan sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor transportasi dan komunikasi mempunyai daya dorong yang kuat terhadap sektor lain, dan tingkat ketergantungan dengan sektor lain relatif rendah. Sektor pertambangan dan penggalan, sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa mempunyai daya dorong dan tingkat ketergantungan yang lemah.



Keterangan: 1. Sektor pertanian, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air bersih, 5. Bangunan, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Angkutan dan komunikasi, 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 9. Jasa-jasa

Gambar 5.1 Indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan Sembilan sektor ekonomi

Dengan menggunakan klasifikasi Sembilan sektor, hasil pengelompokan yang diperoleh dapat dilihat bahwa ada satu sektor yang mempunyai indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi adalah sektor industri pengolahan. Sektor tersebut sering juga disebut sebagai sektor unggulan. Pengembangan terhadap sektor-sektor unggulan tersebut akan memicu pertumbuhan bagi

perkembangan sektor-sektor lain dalam perekonomian di Sulawesi Selatan.

Pada delapan sektor lainnya merupakan sektor pendukung terhadap sektor unggulan yang berada pada kuadran II, kuadran III dan kuadran IV. Sektor-sektor yang termasuk dalam kuadran II yaitu, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor angkutan dan komunikasi. Untuk kelompok III yang kurang andil dalam menciptakan output perekonomian di Sulawesi Selatan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa, dan yang termasuk dalam kelompok IV adalah sektor pertanian.

8. Analisis Efek Pengganda (*Multiplier Effect*)

Tiga variabel yang selalu menjadi perhatian utama dalam analisis angka pengganda adalah output sektor-sektor produksi, pendapatan rumah tangga, dan lapangan kerja. Oleh karena itu, dikenal adanya angka pengganda output, angka pengganda pendapatan rumah tangga, dan angka pengganda kesempatan kerja. Angka pengganda output menunjukkan nilai total dari output yang dihasilkan oleh perekonomian untuk memenuhi adanya perubahan satu unit permintaan akhir di suatu sektor. Dengan menggunakan persamaan 3.17 untuk mengukur besarnya pengganda output (*multiplier output*), dan persamaan 3.19 dan 3.20 untuk

melihat besarnya nilai pengganda pendapatan (*multiplier income*) tipe I dan II, sedangkan untuk melihat besarnya nilai pengganda kesempatan kerja diturunkan dari persamaan 3.21 dan 3.22. Dari persamaan-persamaan tersebut diperoleh nilai masing-masing pengganda sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 5.12.

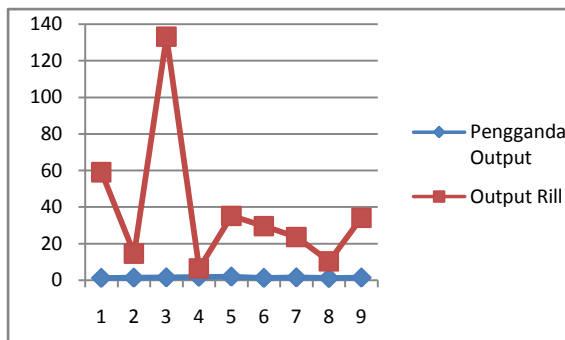
Tabel 5.13 Pengganda output, pengganda pendapatan dan pengganda kesempatan kerja menurut sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009

No	Sektor ekonomi	Pengganda Output		Pengganda Pendapatan		Pengganda kesempatan kerja	
		Tipe I	Tipe II	Tipe I	Tipe II	Tipe I	Tipe II
1	Pertanian	1,32123	1,60528	1,25408	1,49807	1,15916	1,28347
2	Pertambangan dan penggalian	1,47456	1,89204	1,25521	1,49941	3,61233	7,27086
3	Industri pengolahan	1,60121	1,79721	2,51685	3,00673	5,78307	6,96034
4	Listrik, gas dan air bersih	1,93987	2,32320	1,62084	1,93698	4,06604	6,32817
5	Bangunan	2,04602	2,43731	1,72848	2,07674	2,16670	2,78622
6	Perdagangan, hotel dan restoran	1,31757	1,70125	1,16929	1,39693	1,15222	1,36255
7	Angkutan dan komunikasi	1,60027	1,90947	1,56781	1,87280	1,46299	1,84107
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,24828	1,61589	1,18678	1,41774	1,49980	2,74331
9	Jasa-jasa	1,51749	2,71019	1,08072	1,29104	1,40634	2,55545

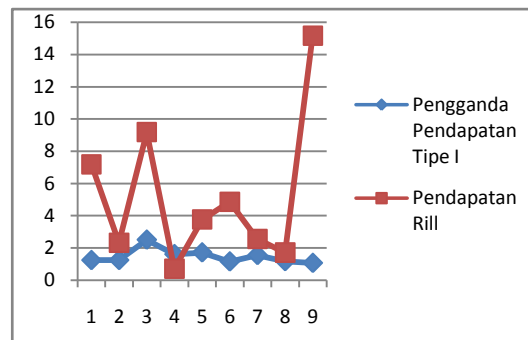
Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5.13 Menunjukkan bahwa sektor bangunan memiliki angka pengganda output terbesar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Kenaikan permintaan akhir sebesar Rp 1 pada sektor bangunan akan mengakibatkan kenaikan output secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp 2,04602. Untuk sektor industri pengolahan sebesar Rp 1,60121, dan sektor pertanian hanya mampu menghasilkan output secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan

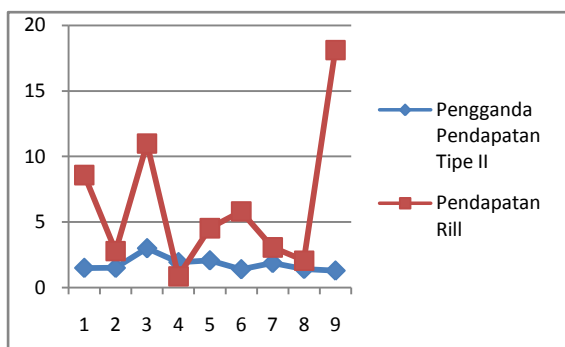
sebesar Rp 1,32123 lebih kecil dibandingkan dengan enam sektor ekonomi lainnya. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor dengan nilai pengganda terkecil.



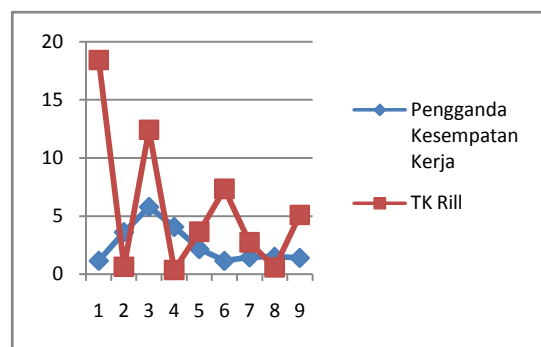
(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan: nilai rill 10^{10} (Pengganda output dan pendapatan)

Gambar 5.2 Kurva Perbandingan nilai efek pengganda nominal dan nilai pengganda rill
 (a) Pengganda output nominal dan output rill, (b) Pengganda Pendapatan nominal dan pendapatan rill tipe I, (c) Penganda pendapatan nominal tipe II dan pendapatan rill, (d) Pengganda kesempatan kerja nominal dan kesempatan kerja rill

Namun nilai tersebut belum menunjukkan besarnya output bruto yang dihasilkan oleh masing-masing sektor. Gambar 5.2a menunjukkan

bahwa besarnya pengganda output riil yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ketika terjadi peningkatan permintaan akhir sebanyak 1 persen, sektor pertanian mampu menghasilkan sebanyak Rp 590,43 miliar dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 1,33 triliun, sedangkan sektor bangunan hanya sebesar Rp 351,8 miliar. Nilai tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dari formasi sebelumnya, dimana sektor pertanian berada pada urutan kedua dengan pengganda output riil. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria dalam menentukan sektor kunci (*leading sector*) dengan melihat besarnya output bruto, baik dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun ke atas), sektor industri pengolahan dapat diklasifikasikan sebagai sektor kunci (*leading sector*) di Sulawesi Selatan.

Untuk pengganda pendapatan, sektor-sektor industri pengolahan berada pada sektor dengan angka pengganda pendapatan tipe I tertinggi yaitu sebesar 2,51685, artinya dengan adanya kenaikan permintaan akhir sebesar Rp 1, dimana variabel rumah tangga bersifat eksogen, akan menyebabkan kenaikan output perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kenaikan output tersebut akan mengakibatkan kenaikan permintaan input antara dan input primer oleh sektor-sektor ekonomi. Pertambahan input primer mendorong peningkatan penerimaan/pendapatan bagi rumah tangga sebesar Rp 2,51685 pada sektor tersebut. Begitu juga dengan pengganda tipe II, dimana variabel rumah tangga bersifat endogen, yang mampu meningkatkan pendapatan sektor tersebut

sebesar Rp 3,00673. Sementara itu, jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada masing-masing sektor sebanyak 1 persen, sektor jasa-jasa akan mengalami peningkatan pendapatan tipe I terbesar yaitu sebesar Rp 151,50 miliar dalam dan tipe II sebesar Rp 180,97 miliar. Gambar 5.2b dan 5.2c menunjukkan kurva pengganda pendapatan tipe I dan II yang sangat berbeda, dimana kurva pengganda pendapatan nominal menunjukkan posisi sektor jasa-jasa berada pada titik terendah dan sebaliknya pada kurva pengganda pendapatan riil berada pada titik tertinggi.

Pada sektor pertanian hanya mampu meningkatkan pendapatan tipe I sebesar 1,25408 unit atau lebih kecil dari lima sektor lainnya, begitu juga dengan pengganda pendapatan tipe II sebesar 1,49807 unit. Sementara itu, jika terjadi penambahan permintaan akhir sebanyak 1 persen, sektor pertanian akan mengalami peningkatan pendapatan tipe I sebesar Rp 71,85 miliar dan tipe II Rp 85,83 miliar atau berada pada posisi ketiga dengan peningkatan pendapatan tertinggi.

Tingkat upah dan gaji rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja pada sektor ini yang relatif kecil menjadi penyebab sektor ini hanya mampu menyumbang pengganda pendapatan yang relatif kecil tersebut. Jika dibandingkan dengan sektor industri pengolahan, dimana setiap penambahan permintaan akhir sebanyak Rp 1 dapat meningkatkan output yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan output sektor bangunan, namun mampu mendorong peningkatan pendapatan yang lebih besar

dibandingkan sektor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sebagai sektor tradisional tidak dapat mendorong pendapatan yang lebih besar bagi tenaga kerja dalam jangka panjang.

Suatu sektor juga dapat diklasifikasikan sebagai sektor kunci (*leading sector*) jika mampu menciptakan kesempatan kerja yang relatif tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya dalam suatu perekonomian. Berdasarkan Tabel 5.13, sektor industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 5,78307. Dengan ada kenaikan permintaan akhir Rp 1 pada sektor tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja 5,78307 orang pada sektor tersebut. Besarnya ketergantungan angkatan kerja Sulawesi Selatan terhadap sektor pertanian pada tahun 2009, sebagaimana tampak pada Tabel 4.3, tidak diikuti oleh daya penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor tersebut. Sektor ini hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,15916 lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri pengolahan yang memiliki ketergantungan angkatan kerja sebesar 13,51 persen dari tenaga kerja sektor pertanian. Meskipun angka penganda sektor ini relatif kecil tetapi kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh sektor ini jauh lebih besar yaitu 18.415 orang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.2d jika terjadi kenaikan sebanyak 1 persen permintaan akhir sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 12.414 orang. Besarnya angka ini mengindikasikan bahwa sektor

pertanian merupakan sektor kunci (*leading sector*) di Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka pendek.

9. Analisis Ketergantungan Ekspor

Derajat ketergantungan ekspor menunjukkan proporsi produksi suatu sektor yang secara langsung maupun tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan keterkaitan suatu sektor dengan aktivitas ekspor. Semakin tinggi derajat ketergantungan suatu sektor berarti semakin besar ketergantungan ekspor terhadap sektor tersebut. Dari Tabel 5.14 di peroleh nilai derajat ketergantungan ekspor, indeks pengganda ekspor terhadap pendapatan dan indeks pengganda ekspor terhadap kesempatan kerja yang diturunkan dari persamaan 3.23, dan 3,26, serta 3,27.

Tabel 5.14 Derajat ketergantungan ekspor, indeks pengganda ekspor terhadap pendapatan, dan indeks pengganda ekspor terhadap kesempatan kerja menurut sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2009

No	Sektor ekonomi	Derajat ketergantungan ekspor	Indeks pengganda ekspor thp output	Indeks pengganda ekspor thp Kesempatan Kerja
1	Pertanian	0,35499	0,38121	0,01350
2	Pertambangan dan pengalihan	0,69783	0,16541	0,00029
3	Industri pengolahan	0,51641	1,02760	0,00265
4	Listrik, gas dan air bersih	0	0	0
5	Bangunan	0	0	0
6	Perdagangan, hotel dan restoran	0,20078	0,10811	0,00306

7	Angkutan dan komunikasi	0,16909	0,05970	0,00076
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,01669	0,00332	0,00002
9	Jasa-jasa	0,00154	0,00083	0,00001

Sumber: Tabel analisis input output Sulsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan data tabel 5.14, menunjukkan bahwa besarnya angka ketergantungan ekspor sektor pertambangan dan penggalian sangat besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 0,69783. Angka ini menunjukkan bahwa ekspor Provinsi Sulawesi Selatan sangat bergantung pada sektor tersebut sebesar 0,69783 kali atau lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya, sedangkan ekspor Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ketergantungan terhadap sektor pertanian lebih kecil dari sektor tersebut yaitu sebesar 0,35499 kali.

Besarnya angka ketergantungan ekspor Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sektor pertanian diikuti dengan besarnya angka pengganda ekspor terhadap output dan kesempatan kerja pada sektor tersebut. Dimana sektor ini memiliki angka pengganda ekspor terhadap output sebesar 0,38121. Angka ini menunjukkan bahwa jika terjadi permintaan output oleh wilayah lain sebanyak Rp 1 akan meningkatkan output Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 0,38121. Sementara itu, hal tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,01350 orang. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian hanya mampu meningkatkan output dan kesempatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing sebesar Rp 0,16541 dan 0,00029 orang.

Besarnya angka ketergantungan ekspor sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa output yang dihasilkan oleh sektor tersebut masih belum mampu diserap sepenuhnya oleh sektor-sektor produksi hilir dalam wilayah atau sektor ini masih sebagai menyediakan bahan mentah bagi sektor-sektor di luar wilayah. Hal ini dapat ditunjukkan pada Keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor pertanian di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,33588 dan 1,90980. Walaupun demikian, sektor ini masih mampu mendatangkan devisa yang relatif tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.9, yaitu sebesar Rp 7,62 triliun, sehingga sektor ini masih dapat dikategorikan sebagai sektor kunci dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pembahasan

1. Keterkaitan Ke Belakang dan Ke Depan Sektor Pertanian

Kegiatan produksi suatu sektor ekonomi dalam suatu wilayah memiliki hubungan, baik secara langsung ke depan dan ke belakang maupun tidak langsung ke depan dan ke belakang, terhadap sektor ekonomi lainnya. Hubungan ke depan berkaitan dengan output yang dihasilkan atau dijual oleh sektor produksi, sedangkan hubungan kebelakang berkaitan dengan bahan mentah atau bahan baku yang diminta atau dibutuhkan oleh sektor produksi dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data Input output Sulawesi Selatan tahun 2009 bersarnya angka keterkaitan langsung ke depan sektor pertanian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,33588 dan keterkaitan langsung ke belakang sebesar 0,22012 lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Begitu juga dengan keterkaitan tidak langsung ke depan dan keterkaitan tidak langsung ke belakang pada sektor pertanian yang masing-masing hanya sebesar 1,90980 dan 1,32123. Jika kita melihat hasil analisis indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009, juga menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu, sektor tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai sektor kunci (*leading sector*) dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil penelitian putri (2008) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian di Provinsi kepulauan Bangka beliting juga bukan merupakan sektor kunci.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli ekonomi pembangunan tidak seimbang, investasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang telah terpilih agar hasilnya cepat berkembang, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor yang lain. Alasan yang mendasar dari teori ini adalah bahwa tidak ada negara yang memiliki modal dengan jumlah yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di semua sektor. Hal ini didukung dengan hasil analisis PDRB Sulawesi

Selatan tahun 2009-2011 menurut penggunaannya, dimana konsumsi pemerintah Sulawesi Selatan hanya sebesar 29,46 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 23,66 persen dari total pengeluaran domestik Sulawesi Selatan.

Pandangan di atas juga didukung oleh pendapat para ekonom aliran klasik dan neoklasik yang menekankan pentingnya akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Besarnya konsumsi pemerintah Sulawesi Selatan belum mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pengeluaran pemerintah, sebagaimana pada hasil analisis pengeluaran daerah Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pemerintah masih lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung yang mencapai rata-rata 57,28 persen per tahun, sedangkan belanja modal hanya sebesar 34,42 persen per tahun. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah ini masih sangat bergantung pada investasi sektor swasta. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan modal yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan, investasi daerah seharusnya diprioritaskan pada sektor kunci (*leading sector*) yaitu sektor industri pengolahan bukan pada sektor pertanian.

Karl Marx juga memiliki pendapat yang sama bahwa negara-negara terbelakang terutama yang memiliki perekonomian dualistis, terdiri dari sektor kapitalis dan sektor pertanian, dapat mereorganisasikan dan memperluas sektor kapitalis dan mengubah sektor pertanian menjadi

sektor kapitalis dalam rangka meningkatkan surplus ekonomi. Sektor pertanian hanya sebagai sektor pendukung terhadap sektor kapitalis dalam menghasilkan persediaan komoditi pertanian yang dibutuhkan oleh sektor kapitalis.

2. Efek Pengganda (*Multiplier Effect*) Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berbeda dengan pandangan aliran neoklasik, Harrod-Domar sebagai aliran neokeynesan berpendapat bahwa pertambahan dalam kesanggupan memproduksi tidak secara sendirinya akan menciptakan pertambahan produksi dari kenaikan pendapatan nasional, namun pertambahan produksi disebabkan oleh adanya kenaikan pengeluaran masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan analisis efek pengganda (*multiplier effect*) di peroleh gambaran besarnya dampak pertambahan permintaan akhir terhadap pertumbuhan keseluruhan output suatu perekonomian.

Berdasarkan hasil analisis pengganda output sektoral di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan bahwa sektor pertanian hanya berada di atas dua sektor terendah yaitu sektor perdagangan, perhotelan dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor ini hanya mampu menciptakan tambahan output sebesar Rp 1,321123 jika terjadi kenaikan pengeluaran masyarakat sebanyak sebanyak Rp 1. Berbeda dengan sektor bangunan sebagai sektor kunci (pendekatan permintaan) mampu menambah output secara keseluruhan sebesar

Rp 2,04602. Walaupun demikian, sektor ini mampu menciptakan output rill yang relatif sangat besar yaitu sebesar Rp 590,434 miliar jika terjadi kenaikan permintaan akhir sebesar satu persen.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mukhyi (2007) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan merupakan sektor dengan nilai pengganda yang relatif tinggi. Namun sektor nonpertanianlah yang memiliki nilai pengganda yang relatif tinggi seperti sektor industri pengolahan. Jika sektor ini dianalisis lebih dalam lagi menjadi beberapa subsektor maka hanya subsektor peternakan yang termasuk memiliki pengganda output yang relatif tinggi di antara beberapa subsektor lainnya.

Pada penggandaan pendapatan, sektor pertanian berada pada urutan ke enam dengan angka tertinggi yaitu sebesar 1,25408. Artinya sektor pertanian hanya mampu memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp 1,25408 pada sektor pertanian jika terjadi penambahan pengeluaran masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp 1 yang lebih kecil dibandingkan dengan lima sektor lainnya. Jika dilihat dari pengganda kesempatan kerja, sektor pertanian mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 1,15916 atau lebih besar dari sektor perdagangan, perhotelan dan restoran. Sektor ini hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,15916 orang atau lebih kecil di bandingkan tujuh sektor lainnya. Meskipun angka penganda sektor tersebut lebih kecil, namun sektor ini mampu menambah pendapatan rill tipe I dan tipe II sebanyak Rp 71,85 miliar dan Rp 85,83 miliar serta

kesempatan kerja riil sebanyak 18.415 orang jika terjadi pertumbuhan permintaan akhir sebanyak satu persen.

Tingginya daya serap tenaga kerja riil sektor pertanian sesuai dengan pandangan W. Athur Lewis yang menganggap sektor pertanian sebagai sektor tradisional sehingga sektor ini memiliki kelebihan tenaga kerja. Jika tenaga kerja sektor ini ditarik ke sektor modern tidak akan mengurangi jumlah output yang dihasilkannya. Oleh karena itu, menurut Lewis seharusnya dilakukan transfer tenaga kerja dari sektor tersebut ke sektor modern yang memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi sedikit demi sedikit. Penyerapan tenaga kerja pada sektor modern memungkinkan jika adanya peluasan output pada sektor tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan didukung oleh investasi dan akumulasi modal secara keseluruhan pada sektor tersebut. Transfer tenaga kerja dan investasi yang besar pada sektor modern menggambarkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Pergeseran sektor ekonomi tersebut dimungkinkan dengan adanya kemampuan sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja yaitu sebesar 5,78307 kali dibandingkan dengan sektor lainnya.

Meskipun sektor pertanian mampu menciptakan kesempatan kerja yang relatif besar jika terjadi pertumbuhan permintaan akhir. Namun sektor ini hanya mampu memberikan upah dan gaji rata-rata bagi tiap tenaga kerja yang relatif sangat kecil di antara sektor ekonomi lainnya. Sehingga, investasi pada sektor ini dengan memperhatikan aspek

kesempatan kerja tidak dapat melepaskan perekonomian Sulawesi Selatan dari masalah kemiskinan.

3. Ketergantungan Ekspor Sektor Pertanian

Hubungan antara masyarakat suatu daerah dengan daerah yang lain dapat ditandai dengan adanya transaksi atau pertukaran barang dan jasa antara daerah tersebut. Dengan adanya hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi ke dua daerah tersebut dalam bentuk devisa. Besarnya nilai ekspor dibandingkan dengan nilai impor akan mampu menciptakan surplus perdagangan bagi suatu daerah.

Berdasarkan hasil analisis ketergantungan ekspor Sulawesi Selatan menunjukkan adanya ketergantungan ekspor daerah ini pada sektor pertanian yaitu sebesar 0,35499 dibandingkan dengan sektor lainnya atau lebih rendah dari sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Hal ini berbeda dengan besarnya nilai perdagangan bersih ekspor Sulawesi Selatan dimana sektor pertanian memiliki nilai sebesar Rp 7.621.937 triliun atau sebesar 1.430,39 persen dari total perdagangan bersih ekspor Provinsi Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Besarnya nilai ekspor bersih tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat diklasifikasi sebagai sektor kunci (*leading sector*) dalam perekonomian Sulawesi Selatan. Besarnya perdagangan bersih tersebut juga mampu meningkatkan pendapatan sektor pertanian

sebesar 0,38121 dan menyerap tenaga kerja sebesar 0,01350 kali dari penambahan 1 unit ekspor Sulawesi Selatan.

Menurut aliran pertumbuhan seimbang, penerimaan ekspor merupakan sumber penting untuk membiayai pembangunan. Ketergantungan ekspor yang besar pada sektor pertanian mampu menutupi besarnya defisit perdagangan, sehingga pertumbuhan sektor dalam negeri harus seimbang dengan pertumbuhan sektor luar negeri. Nurkes melihat pertumbuhan berimbang adalah pondasi yang kuat untuk perdagangan internasional dan juga suatu cara untuk mengisi kekosongan pada batas luar.

Sama halnya dengan pertumbuhan berimbang, Hirschman beranggapan bahwa negara-negara terbelakang lebih baik melakukan ekspor pada tahap-tahap tertentu dan melakukan impor pada tahap selanjutnya. Kegiatan ekspor akan memberikan dampak kaitan mundur yang sangat luas dan mendalam. Dampak kaitan mundur yang merupakan hasil kombinasi berbagai industri tahap akhir dalam suatu daerah atau negara adalah lebih penting lagi. Kaitan mundur ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan. Pendapat ini didukung dengan pandangan Harrod-Domar yang mengatakan bahwa besarnya kenaikan permintaan dipengaruhi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat dari masa ke masa. Oleh karena itu, kenaikan ini akan mempengaruhi terhadap penambahan produksi dan pendapatan nasional.

Meskipun nilai bersih perdagangan sektor pertanian Provinsi Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya tetapi angka ketergantungan sektor ini masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Oleh karena itu, sektor ini belum mampu memberikan dampak yang besar terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel input output Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sektor pertanian memiliki keterkaitan langsung ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang relatif kecil, begitu juga dengan keterkaitan tidak langsung ke depan dan ke belakang yang relatif kecil. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini sektor pertanian tidak dapat dikatakan sebagai sektor kunci dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sektor pertanian memiliki nilai pengganda output, pengganda pendapatan, dan pengganda tenaga kerja yang relatif kecil atau relatif lebih kecil dibandingkan beberapa sektor ekonomi lainnya.
3. Sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat ketergantungan ekspor yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan

dua sektor ekonomi lainnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dianggap perlu untuk memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Povinsi Sulawesi Selatan, diharapkan memfokuskan pembangunan pada sektor kunci (*leading sector*) yaitu, sektor industri pengolahan (dilihat dari keterkaitan ke belakang dan ke depan, dan tingkat output bruto), sektor pertanian (dilihat dari tingkat kesempatan kerja dan tingkat penerimaan bersih devisa) dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.
2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadikannya sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Para ilmuwan diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi dalam mengembangkan ilmu ekonomi pembangunan dan perencanaan khususnya, dan ilmu pengetahuan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2012, *Data Strategis BPS*, CV Nasional Indah: Jakarta.

_____, 2008, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2008*, BPS: Jakarta.

_____, 2009, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2009*, BPS: Jakarta.

_____, 2010, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2010*, BPS: Jakarta.

_____, 2011, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2011*, BPS: Jakarta.

_____, 2012, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2012*, BPS: Jakarta.

BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2012, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan 2011*, Katalog BPS 9302001.73, BPS: Provinsi Sulawesi Selatan.

_____, 2012, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan 2011*, Katalog BPS 9302004.73, BPS: Provinsi Sulawesi Selatan.

_____, 2011, *analisis input-output antar sektor Sulawesi Selatan (penyusunan tabel input-output sulsel tahun 2009)*, BPS: Provinsi Sulawesi Selatan.

Bapepeda Provinsi Sulawesi Selatan, 2012, *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2012*, Bapedda: Jakarta

Bapepeda Provinsi Sulawesi Selatan, 2008, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028*, Bapedda: Makassar.

Cakrawalaonline,7/6/2013,KTNA *Minta Syahrul Lanjutkan Program Pertanian*,(online), (<http://cakrawalaberita.com/daerah/ktna-minta-syahrul-lanjutkan-program-pertanian>), diakses 1 Maret 2013).

- Chebb, E., H., 2010, *Agriculture and Economic Growth in Tunisia*. *China Agricultural Economic Review*, Vol. 2 Iss: 1. (Online). (<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1834557>, diakses 3 Maret 2013).
- Daryanto, A., & Hafizrianda, Y., 2010, *Analisis Input-Output & Analisis Accounting Matrix; Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*, IPB Press: Bogor.
- Dornbusch, R., Fisher, S., & Startz, R., 2008, *Makroekonomi*, PT Media Global Edukasi: Jakarta.
- Fakih, M., 2008, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, pustaka pelajar: Yogjakarta.
- Jhingan, M. L., 2001, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Rajawali Pers: Jakarta
- Kuncoro, M., 2001, *Metode Kuantitatif; Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Mehboob, F., 2012, *Role of Agriculture in Economic Growth of Pakistan* *International Research Journal of Finance and Economics* No. 83 pp. 180-186. (online). (<http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32273/> diakses 3 Maret 2013).
- Miller, R. E., & Blair, P. D., 1985, *Input Output Analisis: Foundation and Extensions*, Prentice-Hall: New Jersey.
- Mukhyi, M. A., 2007, *Analisis Peranan Subsektor Pertanian Dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat*, (Online), (<http://repository.gunadarma.ac.id/handle/123456789/552>, diakses 2 Maret 2013).
- Novita, D., Rahmanta, dan Mahalli, K. 2009, *Menganalisis Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Sumatra Utara*, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7190/1/09E01887.pdf>, di akses 1 Maret 2013).
- Nursini, 2012, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah: teori dan aplikasi*, PPKED-FEUH: Makassar.
- Perkin, D. H, Radelt, S., Snodgrass, D. R., Gill, M., & Romer, M., ,2001, *Economics Of Development, Fifth Edition*, Norton: United State of America

- Putri, S. A. C., 2008, *Menganalisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Online)*: (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/18166?show=full>, di akses 1 Maret 2013).
- Razak, A. R., 2009, *Esensi Pembangunan Daerah*, Nala Cipta Litera: Makassar.
- Setyowati, N., 2012, *Coba Menganalisis Peran Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo, (Online)*, (<http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/Jurnal-SEPA-174-ANALISIS-PERAN-SEKTOR-PERTANIAN-DI-KABUPATEN-SUKOHARJO.pdf>, diakses 1 Maret 2013).
- Sukanto, D.G.T., 2011, *Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa Tengah, (Online)*, (<http://eprints.undip.ac.id/27364/1/SKRIPSI LENGKAP%28r%29.pdf>, diakses 1 Maret 2013).
- Stimson, R., J., Stough, R., R., & Roberts, B., H., 2006, *Regional economic development: analysis and Planing Strategy, edisi ke-2*, Springer: Heidelberg.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011, *Indikator Kesejahteraan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan*, TNP2K: Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C., 2006, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan Jilid 1*, Erlangga: Jakarta.
- Vivanews, 4/6/2012, *Lima Propinsi Penghasil Beras Terbanyak, (online)*, (<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/332635-lima-provinsi-penghasil-beras-tertinggi>, diakses 1 Maret 2013).
- Yustika, A. E., 2009, *Ekonom Politik; Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris*, Pustaka Pelajar: Malang.

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Andi Samsir
2. Tempat tgl. Lahir : Tawau, 2 Maret 1984
3. Alamat : Jalan Tun Abdul Razak
Perumahan Geraha Lestari
Makassar blok A4/32 Kota Makassar
Sulawesi Selatan
4. Email/hp/fb : Syamsir_fe03unm@yahoo.co.id, atau
Syamsirepp2011@gmail.com, 085399391683,
Andi Muhammad Syamsir
5. Status sipil : Belum Menikah
 - a. Nama istri : -
 - b. Nama anak : -

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Tamat SD tahun : 1996
 - b. Tamat SLTP tahun : 1999
 - c. Tamat SLTA tahun : 2002
 - d. Sarjana (S1) tahun : 2007
2. Pendidikan non formal
 - a. Workshop optimalisasi peran dan Fungsi FMS dalam pengawalan isu-isu publik berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar warga FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION
 - b. Semiloka Penyusunan rencana strategis FMS FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION
 - c. Training Strategi mendorong pemenuhan dan pengawalan hak-hak dasar warga dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION.

- d. Training analisis kebijakan perencanaan dan penganggaran yang pro poor dan responsif gender. FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION.
- e. Training Teknik perumusan skala prioritas program pembangunan berbasis komunitas. FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION.
- f. Lokakarya perumusan hasil Need Assesment. FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION.
- g. Training Optimalisasi peran dan Fungsi Fasilitator musrenbang. FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION.
- h. Seminar dan lokakarya Peluang dan tantangan efektifitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION.
- i. Semiloka Strategi Pelibatan Masyarakat miskin dalam proses penyusunan dan perumusan RPJMdes (Bone). FIK ORNOP SULSEL Bekerjasama dengan FORD FOUNDATION.
- j. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru Sertifikasi Penitia Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar

C. Pekerjaan dan Riwayat Pekerjaan

1. Guru MAN 2 Watampone Sulawesi Selatan
2. Guru MAS Yapit Taretta Kabupaten Bone Sulawesi Selatan
3. Dosen STKIP Muhammadiyah Bone Sulawesi Selatan
4. Yapit NGO Sulawesi Selatan
5. Peneliti Muda Masagena Center Sulawesi Selatan
6. Forum Masyarakat Sipil Kabupaten Bone